

**PENGARUH ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DALAM
MEMEDIASI HUBUNGAN ANTARA AKUNTABILITAS DAN
TRANSPARANSI TERHADAP KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN DAERAH**

Untuk memenuhi persyaratan

Mencapai Drajat Sarjana S1

Program Studi Akuntansi



Disusun oleh :

Reinaldi Aenurizky

NIM : 31401900137

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEMARANG

2023

HALAMAN PENGESAHAN

Usulan Penelitian Skripsi

**PENGARUH ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DALAM
MEMEDIASI HUBUNGAN ANTARA AKUNTABILITAS DAN
TRANSPARANSI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
DAERAH**

Disusun Oleh

Reinaldi Aenurizky

31401900137

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya dapat diajukan ke hadapan
sidang panitia ujian penelitian Skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Sultan Agung

Semarang, 14 Agustus 2023

Dosen Pembimbing



Dr. Dra. Hj. Winarsih, SE, M.Si., CSRS

NIK. 211415029

HALAMAN PENGESAHAN

**PENGARUH ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DALAM
MEMEDIASI HUBUNGAN ANTARA AKUNTABILITAS DAN
TRANSPARANSI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
DAERAH**

Disusun Oleh

Nama Reinaldi Aenurizky

NIM 31401900137

Telah dipertahankan di depan dosen penguji
pada tanggal, 18 Agustus 2023

Susunan Dewan Penguji

Dosen Penguji I

Dosen Penguji II

Dr. Edy Suprianto, SE, M.Si, Akt, CA

Dr. Chrisna Suhendi, SE, MBA, Ak., CA

NIK. 211406018

NIK. 210493034

Dosen Pembimbing

Dr. Dra. Hj. Winarsih, SE, M.Si., CSRS

NIK. 211415029

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana
Akuntansi pada tanggal, 14 Agustus 2023

Ketua Program Studi S1 Akuntansi

Provita Wijavanti, SE., M.Si., Ak., CA

NIK. 211403012

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :Reinaldi Aenurizky

NIM : 31401900137

Fakultas /Prodi : Ekonomi/Akuntansi

Universitas : Universitas Islam Sultan Agung

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Pengaruh Organisasi Perangkat Daerah Dalam Memediasi Hubungan antara Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah” adalah benar – benar hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulisan orang lain tanpa menyebut sumbernya.

Semarang, 18 Agustus 2023
Pernyataan



Reinaldi Aenurizky
NIM : 31401900137



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian ini juga menggunakan variabel mediasi yaitu organisasi perangkat daerah.

Populasi dalam penelitian ini merupakan organisasi perangkat daerah yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Metode sampling dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* dengan kriteria tertentu. Setelah melalui tahap sampling dan tahap pengolahan data, didapatkan 10 sampel dari 48 organisasi perangkat daerah di Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan teknik analisis jalur untuk menguji hipotesis penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Organisasi perangkat daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap organisasi perangkat daerah sedangkan transparansi berpengaruh signifikan terhadap organisasi perangkat daerah.

Kata kunci : Akuntabilitas, Transparansi, Kualitas Laporan Keuangan, Organisasi Perangkat Daerah

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of accountability and transparency on the quality of financial statements. This study also uses a mediating variabel, namely the regional apparatus organization.

The population in this study is a regional apparatus organization in Central Java Province. The sampling method in this study is purposive sampling with certain criteria. After going through the sampling stage and the data processing stage, 10 samples were obtained from 48 regional apparatus organizations in Central Java. This study uses path analysis techniques to test the research hypothesis.

The results of this study indicate that accountability and transparency have a significant effect on the quality of financial statements. Regional apparatus organizations have a significant effect on the quality of financial statements. Accountability has no significant effect on regional device organizations while transparency has a significant effect on regional device organizations.

Keywords: *Accountability, Transparency, Quality of Financial Statements, Regional Apparatus Organization*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah – Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini hingga akhir dengan judul : **PENGARUH ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DALAM MEMEDIASI HUBUNGAN ANTARA AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH**. Penulisan laporan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata (S1) di Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

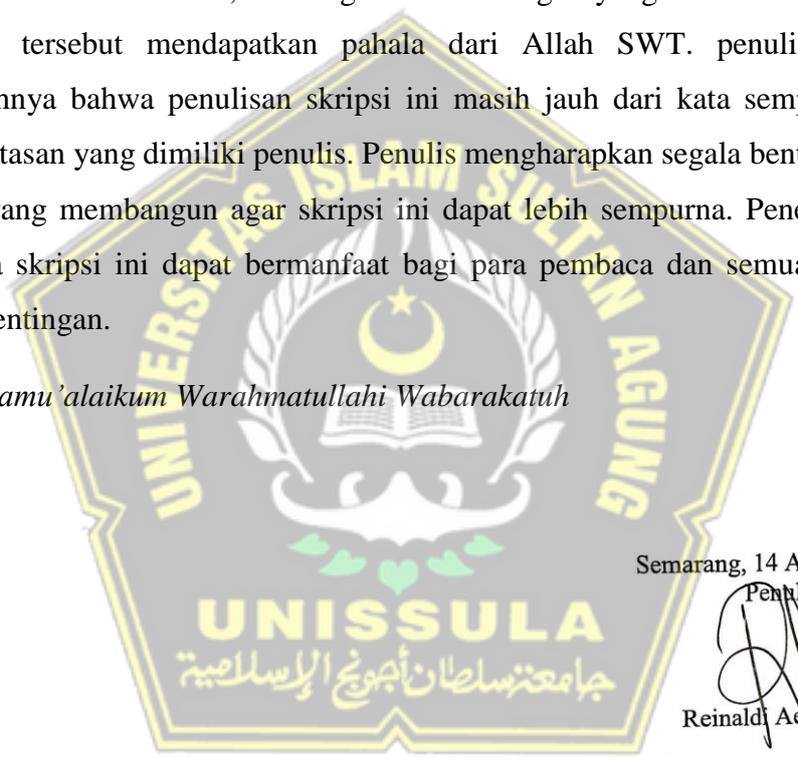
Proses penyusunan laporan skripsi ini peneliti menyadari mendapatkan bantuan, bimbingan serta dukungan penuh dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini peneliti mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan bantuan yang diberikan kepada penulis, kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. H. Heru Sulistyono, S.E., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Ibu Provita Wijayanti, SE., M.Si., Ak, CA, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Dra. Hj. Winarsih, SE, M.Si., CSRS. Selaku dosen pembimbing yang penuh kesabaran dalam membimbing dan mengarahkan peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu peneliti selama proses perkuliahan.
5. Kedua Orang tua, bapak Kusaeri dan ibu Nurlaeli Sopiayah yang tak pernah berhenti untuk memanjatkan do'a, membimbing dan mendukung baik dalam segi moral maupun materiil serta selalu mencurahkan kasih sayang.
6. Helmi Nuky Nugroho dan Fitri Widya Damayanti selaku kakak serta adik yang selalu memberikan do'a dan dukungannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

7. Teman – teman organisasi mahasiswa baik KMFE, UKM PSHT, Akuntan Muda IAI Jawa Tengah, maupun Senior – senior yang selalu memberikan doa dan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
8. Teman – teman desa Tanahbaya dan Kontrakan yang selalu memberikan doa serta support sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Seluruh pihak yang membantu dalam penyusunan skripsi dari awal hingga akhir, yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Semoga seluruh bantuan, bimbingan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis tersebut mendapatkan pahala dari Allah SWT. penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan yang dimiliki penulis. Penulis mengharapkan segala bentuk kritik dan saran yang membangun agar skripsi ini dapat lebih sempurna. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak yang berkepentingan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Semarang, 14 Agustus 2023

Penulis

Reinaldi Aenrizky

CC BY-SA

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Pertanyaan penelitian	8
1.4 Tujuan Penelitian	8
1.5 Manfaat Penelitian	9
1.5.1 Manfaat Teoritis	9
1.5.2 Manfaat Praktis	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Landasan Teori	10
2.1.1 Teori Keagenan.....	10
2.1.2 Teori Peran.....	11
2.2 Variabel Penelitian	11
2.2.1 Akuntabilitas.....	11
2.2.1.1 Komponen Akuntabilitas.....	13
2.2.2 Transparansi	15
2.2.2.1 Ekonomi dan Transparansi Pemerintah Daerah ...	16
2.2.3 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	17
2.2.3.1 Kualitas Laporan Keuangan	18
2.2.4 Organisasi Perangkat Daerah	20
2.3 Penelitian Terdahulu.....	21
Tabel 2.1 Penelitian terdahulu tentang pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan daerah	22

Tabel 2.2 Penelitian terdahulu tentang pengaruh transparansi terhadap kualitas laporan keuangan daerah	23
Tabel 2.3 Penelitian terdahulu tentang Organisasi Perangkat Daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah.....	24
Tabel 2.4 Penelitian terdahulu tentang akuntabilitas terhadap Organisasi Perangkat Daerah	25
Tabel 2.5 Penelitian terdahulu tentang transparansi terhadap Organisasi Perangkat Daerah	25
2.4 Kerangka Pemikiran Teoritis dan Pengembangan Hipotesis	26
2.4.1 Kerangka Pemikiran Teoritis.....	26
Gambar 2.4 Kerangka Pemikiran	27
2.4. 2 Pengembangan Hipotesis	28
BAB III METODE PENELITIAN	33
3.1. Jenis Penelitian	33
3.2. Populasi dan Sampel	33
3.2.1 Populasi	33
3.2.2. Sampel.....	34
3.3. Sumber dan Jenis Data	34
3.4. Metode Pengumpulan Data	35
Tabel 3.2 Modified likert-type.....	35
3.5. Variabel dan Definisi Operasional Variabel	35
Tabel 3.3	37
Definisi Variabel.....	37
3.6. Teknik Analisis	38
3.6.1 Uji Kualitas Data	38
3.6.2. Uji Asumsi Klasik	39
3.6.3. Teknik Analisis Data	41
3.6.4. Uji Kelayakan Model.....	42

BAB IV	46
HASIL DAN PEMBAHASAN	46
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	46
4.1.1 Distribusi Penyebaran Kuesioner	46
Tabel 4.1 Penyebaran Kuesioner	46
4.1.2 Karakteristik Responden	47
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	47
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	
Error! Bookmark not defined.	
Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	48
Tabel 4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan	48
4.2 Hasil Uji Kualitas Data	49
4.2.1 Hasil Uji Validitas Data	49
Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas Data	49
4.2.2 Hasil Uji Realibilitas	51
Tabel 4.7 Hasil Uji Realibilitas	51
4.3 Analisi Data	52
4.3.1 Analisis Statistik Deskriptif	52
Tabel 4.8	52
Statistik Deskriptif	52
4.4 Hasil Uji Asumsi Klasik	54
4.4.1 Hasil Uji Normalitas	54
Tabel 4.9 Hasil Uji Normalitas	55
4.4.2 Hasil Uji Multikolinieritas	55
Tabel 4.10 Hasil Uji Multikolinieritas	56
4.4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas	56
Tabel 4.11 Hasil Uji Heteroskedastisitas	57
4.5 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda	57
Tabel 4.12 Model Persamaan Regresi Model 1	57
Tabel 4.13 Model Persamaan Regresi	59
Model 2	59

4.6 Uji Kebaikan Model	61
4.6.1 Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F).....	61
Tabel 4.14.....	61
Hasil Analisis Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)	61
Anantara Akuntabilitas, Transparansi, Kualitas Laporan Keuangan dengan Organisasi Perangkat Daerah.....	61
4.6.2 Hasil Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R ²)	62
Tabel 4.15.....	62
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R ²)	62
Model 1	62
Tabel 4.16 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R ²) Model 2	63
4.6.3 Pengujian Hipotesis	63
Hasil Uji Parsial (Uji t).....	63
Tabel 4.17 Hasil Uji t	64
4.7 Pengujian Tidak Langsung.....	66
Gambar 4.1 Pengaruh langsung dan tidak langsung.....	67
Tabel 4.18 Hasil Uji Sobel Test	67
Model 1	67
Gambar 4.2	67
Hasil Uji Sobel	68
Tabel 4.19.....	68
Hasil Uji Sobel Test.....	68
Model 2	68
Gambar 4.3	69
Hasil Uji Sobel	69
4.8 Pembahasan Hasil Penelitian	69
4.8.1 Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kualitas Laporan Keuangan.....	69
4.8.2 Pengaruh Transparansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan.....	70

4.8.3 Pengaruh Organisasi Perangkat Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan	71
4.8.4 Pengaruh Akuntabilitas terhadap Organisasi Perangkat Daerah	72
4.8.5 Pengaruh Transparansi terhadap Organisasi Perangkat Daerah	72
BAB V	74
PENUTUP	74
5.1 Kesimpulan	74
5.2 Implikasi.....	75
5.3 Keterbatasan Penelitian.....	76
5.4 Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN - LAMPIRAN	78



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan daerah merupakan hasil proses identifikasi, pengukuran, dan pencatatan transaksi ekonomi (keuangan) oleh suatu entitas akuntansi yang ada di lingkungan pemerintah daerah dan digunakan sebagai informasi dalam rangka pemerintahan daerah, dan keputusan ekonomi - dibuat oleh pihak-pihak yang membutuhkannya. Erlina, Rambe, dan Rasdianto (2015).

Kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah merupakan ciri kualitatif laporan yang menyajikan posisi keuangan, operasional, dan informasi lain suatu pemerintah daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan ini (1) dapat diandalkan, (2) relevan, (3) dapat dipahami dan, dalam beberapa hal, merupakan laporan keuangan utama pemerintah. Kualitas tinggi. (4) Sebanding. (Muhasaba dan Akuntansi 2021).

Kualitas laporan keuangan bertujuan untuk meningkatkan keandalan, menyajikan informasi secara lengkap dan tepat sesuai kebutuhan penggunanya, sehingga menjamin transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah. (Putra 2018).

Pihak eksternal membutuhkan pelaporan keuangan daerah dengan kualitas terbaik. Dalam filosofi agency, interpretasi akuntansi menawarkan dua tujuan. Pengambilan keputusan pemilik dan manajemen adalah yang pertama, yang kedua

digunakan untuk membandingkan, mengurutkan berdasarkan hasil kondisi kerja yang disepakati. (Purba dan Purba 2023).

Chen, Tang, Jiang dan Lin (2010) mendefinisikan kualitas laporan keuangan sebagai *“the extent to which the financial statements provide true and fair information about the underlying performance and financial position”*. Dari definisi tersebut, kualitas laporan keuangan diukur dari kebenaran dan kejujuran dalam mengungkapkan posisi operasi dan keuangan organisasi. (S and Djamhuri 2017).

Dalam menentukan kualitas pelaporan keuangan daerah, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain akuntabilitas dan transparansi sebagai standar penyajian pelaporan keuangan daerah yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, organisasi perangkat daerah mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan daerah.

Akuntabilitas merupakan bentuk dari pertanggungjawaban baik secara finansial, maupun ketaatan pada peraturan yang berlaku. Akuntabilitas salah satu kunci dalam mewujudkan tata – kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu akuntabilitas merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai kualitas keuangan daerah (Setyo 2020).

Upaya pemerintah dalam menghasilkan pemerintahan yang bersih sebagai upaya untuk memenuhi kehendak masyarakat luas atas akuntabilitas di implementasikan pada Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) dan

sebagai *outputnya* ialah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Namun, organisasi pemerintah melaporkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai pelaporan akuntabilitas kinerja hanya sekedar formalitas untuk memenuhi ketentuan regulasi agar memperoleh dukungan kuat baik dari segi politik maupun legitimasi (Setyo 2020).

Akuntabilitas merupakan dasar guna mencegah adanya penyalahgunaan wewenang, serta memastikan wewenang tersebut diarahkan untuk mewujudkan tujuan dan target. Entitas kebijakan publik dalam hal ini ialah lembaga pemerintah yang bertanggungjawab atas sikap, perilaku, dan tindakannya terhadap masyarakat dalam melaksanakan kewajiban, fungsi dan wewenangnya (A. C. P. Putri and Akbar 2022).

Akuntabilitas keuangan penting karena merupakan fokus dari masyarakat. Akuntabilitas keuangan adalah untuk menghindari penyalahgunaan dana publik. Pelaporan keuangan merupakan salah satu alat yang memudahkan terciptanya transparansi dan akuntabilitas kepada publik. Laporan keuangan pemerintah daerah disajikan secara lengkap (Zeyn 2018).

Akuntabilitas dalam pandangan Islam sebagaimana tertuang dalam Al – Qur'an yang menjelaskan mengenai tanggungjawab seorang yang terdapat pada surat Al – Zalzalah ayat 7 – 8 yang mempunyai arti “(7) *Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya.* (8) *dan Barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya pula.*”

Penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Akbar (2022), Tahir, Malia, dan Faisol (2021), Panjaitan dan Adam (2022) menunjukkan bahwa Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan daerah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Setyawan dan Erryana (2016), Setyo (2020) mendasarkan pada hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa adanya penelitian yang berbeda – beda. Selain akuntabilitas dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah, transparansi juga di indikasikan dapat mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan daerah.

Transparansi adalah salah satu nilai pengelolaan yang baik. Yupita (2020) menyatakan bahwa transparansi adalah asas agar masyarakat dapat memiliki informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan dan terjaminnya kebebasan untuk mengakses informasi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah terhadap masyarakat, proses penyusunan dan pengambilan kebijakan, serta hasil yang telah dicapai. (Panjaitan and Adam 2022) Dengan adanya transparansi, masyarakat akan dapat mengevaluasi kinerja pemerintah daerah baik dari segi proses pelayanan publik maupun proses dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Publikasi Informasi Publik (UU KIP), setiap badan publik mempunyai kewajiban untuk menyediakan informasi publik melalui media cetak dan elektronik. Informasi publik diatur dalam Peraturan Komisi Informasi 1/2010 tentang standar pelayanan informasi publik dan informasi yang berkaitan dengan pelaporan keuangan yang harus disediakan, yang selanjutnya diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri/188.52/1797/SJ/2012. (Sutaryo and Tri Amanu 2020).

Dengan adanya transparansi yang tepat maka akan memberikan pengetahuan langsung kepada masyarakat dan dapat meningkatkan kontrol terhadap DPRD, serta efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada khususnya dan pada umumnya. (Jatmiko 2020).

Transparansi dalam menentukan kualitas laporan keuangan daerah ditandai dengan keterbukaan informasi kepada publik mengenai regulasi, kebijakan, dan anggaran program pemerintah. Keberadaan transparansi juga berarti setiap orang mempunyai hak dalam memiliki informasi yang berkaitan dengan kepentingannya dan aspirasi (Putri, Damayanti, dan Hapsari 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Setyo (2020), Muhtar, Putro, dan Sutaryo (2017), Nasution (2019), Putri dan Akbar (2022) menunjukkan bahwa Transparansi berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan daerah. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Dutta dan Mukherjee (2018), Alfarizi dan Juniarti (2020) mendasarkan pada hasil penelitian tersebut menunjukkan masih adanya hasil penelitian yang berbeda – beda.

OPD mempunyai peran dalam melakukan pengendalian dan penyampaian informasi sehingga mewujudkan informasi yang Akuntabel, Transparan dan Terintegritas karena Masyarakat sangat membutuhkan tanggung jawab untuk kemajuan suatu daerah di segala sector.

Organisasi Perangkat Daerah merupakan bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, dengan memperkuat kapasitas seluruh lembaga kerja dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya ke arah pedoman tata kelola yang baik bagi pelaksanaan pengawasan internal dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dapat diatasi.

Pemerintah Daerah (Pemda) mempunyai tugas menjalankan amanahnya untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat di daerahnya masing-masing. Pemerintah daerah diharapkan mampu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat yang ditunjukkan dengan nilai kinerja yang tinggi. Namun, beberapa pemerintah daerah mempunyai skor kinerja yang relatif rendah. (Sutopo et al. 2017).

Organisasi Perangkat Daerah mempunyai tugas yang sangat besar, apalagi untuk keberlangsungan suatu kualitas laporan keuangan daerah harus ada keterbukaan dalam informasi yang beredar. Hal yang bisa dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam menanggapi penyampaian informasi tersebut adalah membuat laporan keuangan suatu daerah dengan cara Akuntabilitas dan Transparansi itu akan mewujudkan daerah yang berkelanjutan apalagi masyarakat sangat jeli atas aktivitas atau perkembangan oleh organisasi sektor publik.

Penelitian ini mengacu pada Putri dan Akbar (2022) dengan menghilangkan variabel kompetensi sumber daya manusia dan menambahkan variabel Organisasi Perangkat Daerah sebagai variabel mediasi.

Kompetensi sumber daya manusia tidak digunakan dalam penelitian ini karena lembaga sektor publik di Indonesia menerapkan kualifikasi yang baik dalam menentukan aparatur pemerintah sesuai dengan ketentuan serta aturan yang berlaku

seperti melakukan pelatihan, promosi jabatan, ketrampilan diri dan pemahaman pedoman kebijakan.

Menambahkan Organisasi Perangkat Daerah sebagai variabel mediasi bertujuan untuk mengetahui dan memahami fungsi dari Organisasi Perangkat Daerah seperti evaluasi serta kegiatan pengendalian dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan *research gap* dibandingkan dengan uraian konteks di atas, ditemukan permasalahan: Masih terdapat hambatan terkait akuntabilitas dan transparansi organisasi daerah terhadap kualitas pelaporan keuangan daerah. yang dimana kejelasan dan keterbukaan anggaran bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat, Akuntabilitas juga mengukur seberapa bertanggungjawabnya pejabat atau karyawan dalam menjalankan profesi, Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah pada seluruh aspek kualitas pelaporan keuangan dan penerapan transparansi merupakan salah satu langkah menunjukkan kualitas pelaporan keuangan daerah kepada publik. Oleh karena itu, masalah penelitian dapat dikemukakan sebagai berikut: “Bagaimana organisasi perangkat daerah dalam memediasi hubungan antara akuntabilitas dan transparansi terhadap kualitas pelaporan keuangan daerah di provinsi Jawa Tengah?”

1.3 Pertanyaan penelitian

Berdasarkan konteks yang telah di uraikan diatas, maka pertanyaan penelitiannya adalah :

1. Apakah Akuntabilitas berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah?
2. Apakah Transparansi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah?
3. Apakah Organisasi Perangkat Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
4. Apakah Akuntabilitas berpengaruh terhadap Organisasi Perangkat Daerah?
5. Apakah Transparansi berpengaruh terhadap Organisasi Perangkat Daerah ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah di tentukan, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menganalisis pengaruh Akuntabilitas dalam Kualitas Laporan Keuangan di Pemerintah Daerah
2. Menganalisis pengaruh Transparansi dalam Kualitas Laporan Keuangan di Pemerintah Daerah
3. Menganalisis Organisasi Perangkat Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

4. Menganalisis pengaruh Akuntabilitas dalam Tujuan Organisasi Perangkat Daerah
5. Menganalisis pengaruh Transparansi dalam Tujuan Organisasi Perangkat Daerah

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai perencanaan dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang akuntansi sektor publik, yang dapat menjadi acuan untuk kajian lebih lanjut mengenai determinan struktur organisasi daerah terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintahan daerah.

1.5.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan laporan untuk memberikan masukan kepada pemangku kepentingan dalam menentukan kebijakan mengenai penyajian kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan

Teori Keagenan mengacu pada (Agustiningsih, Murni, and Putri 2017) merupakan teori dasar yang menjadi landasan praktik bisnis. Teori ini merupakan hasil sintesis dari teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi dan teori organisasi. Prinsip dasar teori ini menyatakan bahwa terdapat kemitraan antara pemberi hibah (principal), dalam hal ini investor, dan penerima kewenangan (agency), dalam hal ini pengelola, dalam badan pengatur bentuk kerjasama kontrak, yaitu pengikatan kontrak..

Teori Keagenan di terapkan di pemerintah daerah sejak tahun 1999 ketika otonomi daerah di terapkan di Indonesia. Pemilihan teori keagenan berdasarkan analisis dua perspektif, hubungan antara eksekutif dan legislative serta rakyat, dimana implikasinya mungkin datang secara positif dalam bentuk efisiensi, tetapi sering kali datang secara negative dalam bentuk efisiensi. Perilaku oportunistik. Konsekuensi ini terjadi karena agen memahami informasi keuangan lebih baik dari pada principal, sedangkan principal cenderung memaksakan kepentingan pribadinya (*self – interest*) karena memiliki kewenangan. Masalah keagenan muncul ketika lembaga eksekutif cenderung memaksimalkan kepentingannya sendiri, mulai dari proses anggaran, melalui pengambilan keputusan, hingga penyusunan laporan keuangan yang masuk akal yang menunjukkan bahwa mereka

bekerja dengan baik, selain untuk mengamankan kedudukan mereka di mata masyarakat dan legislative.

2.1.2 Teori Peran

Teori peran berfokus pada perspektif dengan menjelaskan interaksi sosial sebagai perilaku yang dikaitkan dengan posisi sosial tertentu. Teori ini menawarkan kemungkinan mempelajari manusia sebagai makhluk hidup, makhluk yang mempunyai akal dan kendali atas eksistensi sosial. Teori peran berkaitan dengan perilaku individu dalam lingkungan sosial, yang merupakan penentu utama batas-batas pertukaran sosial dan kemungkinan masa depan. Salah satu asumsi yang dikemukakan ketika menjalankan peran dalam lingkungan sosial adalah keberhasilan tugas dan kewajiban bergantung pada penguasaan perilaku peran. Peran Organisasi Perangkat Daerah dalam pengendalian Keuangan Daerah adalah memastikan kinerja keuangan daerah telah sesuai dengan peraturan dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya secara efisien dan efektif. (Nimas Ayu Pulpi).

2.2 Variabel Penelitian

2.2.1 Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah tentang penyediaan informasi antara dua pihak. Seseorang bertanggung jawab untuk memberikan penjelasan atau pembenaran kepada pihak lain yang memiliki hak pertanggungjawaban. Selain itu, bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya serta implementasi yang dipercayakan kepada mereka merupakan dasar akuntabilitas (Kholmi 2022).

Akuntabilitas terhadap mutu pelaporan keuangan daerah adalah kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil proses akuntansi keuangan daerah dalam bentuk laporan keuangan tentang pengelolaan sumber daya yang telah disediakan. Salah satu proses atau langkah utama dalam akuntabilitas adalah proses akuntansi dan pelaporan, karena akuntansi dan pelaporan merupakan hal mendasar dan merupakan pendorong utama dalam mempengaruhi pengambilan keputusan. (Akuntansi dan Mangkurat 2017)

Dalam bidang Organisasi Sektor Publik, Akuntabilitas mengharuskan pemerintah untuk menjelaskan yang logis dan tepat terkait tentang asal usul dan alokasi sumberdaya kepada publik. Dalam kondisi saat ini, akuntabilitas adalah tentang mengamati dan mengendalikan perilaku pemerintah, mengembangkan pertahanan, memusatkan kekuasaan, dan membangun kapasitas untuk mencapai administrasi publik yang efektif. Ada dua jenis akuntabilitas dalam sistem pemerintahan konstitusional, yaitu akuntabilitas internal dan akuntabilitas eksternal. Akuntabilitas internal merupakan model akuntabilitas langsung dari sudut pandang pelaporan dari bawahan kepada tingkat senior, bukan kepada penguasa. Sedangkan akuntabilitas eksternal adalah model akuntabilitas secara tidak langsung yang mengimplikasikan pelaporannya kepada pihak diluar organisasi (Setyo 2020).

Sistem akuntabilitas profesional dicirikan oleh penghormatan terhadap keahlian, di mana hubungan hierarkis dapat berubah, tergantung pada kekuatan pengaturan dan siapa yang ditetapkan sebagai ahli. Terakhir, akuntabilitas

politik mendorong daya tanggap terhadap konstituen sebagai dasar pemerintahan yang terbuka dan representatif (Skedsmo dan Huber 2019).

Akuntabilitas adalah kemampuan memberikan jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi mengenai tindakan seseorang atau sekelompok orang terhadap masyarakat umum dalam suatu organisasi. Akuntabilitas artinya para pengambil keputusan di organisasi publik, swasta, dan masyarakat sipil harus dapat dipertanggungjawabkan (*accountable*) kepada masyarakat (*public*) maupun kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Menurut UNDP, akuntabilitas adalah penilaian kinerja suatu organisasi terhadap kegiatan/hasilnya untuk akuntabilitas dan umpan balik kepada pemimpin organisasi sehingga kinerja lebih lanjut dapat ditingkatkan dalam kegiatan organisasi di masa depan. Akuntabilitas dapat dicapai dengan:

- a. Upaya untuk membuat pejabat bertanggung jawab atas semua tindakan pemerintah dan peka terhadap identitas yang mereka pegang kekuasaannya
- b. Identifikasi kriteria untuk mengukur kinerja pejabat pemerintah dan tetapkan mekanisme untuk memastikan standar terpenuhi.

2.2.1.1 Komponen Akuntabilitas

Komponen akuntabilitas ada 5, yaitu :

1. Akuntabilitas dan kejujuran (*accountability for probity and legality*).
Tanggung jawab berkaitan dengan kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan lain yang diwajibkan dalam organisasi, sedangkan tanggung jawab atas kejujuran mencakup menghindari penyalahgunaan

kekuasaan, korupsi, dan kolusi. Akuntabilitas hukum menjamin penghormatan terhadap supremasi hukum, sedangkan akuntabilitas yang jujur menjamin kinerja organisasi yang baik.

2. Akuntabilitas manajerial. Akuntabilitas manajerial yang juga dapat dipahami sebagai tanggung jawab kinerja adalah tanggung jawab pengelolaan suatu organisasi secara efektif dan efisien.
3. Akuntabilitas Program, Akuntabilitas program juga berarti bahwa program suatu organisasi merupakan program yang bermutu dan mendukung strategi pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Lembaga publik bertanggung jawab terhadap program yang telah dikembangkan hingga program tersebut dilaksanakan.
4. Akuntabilitas kebijakan Lembaga-lembaga publik harus mampu menafsirkan kebijakan-kebijakan yang telah diidentifikasi dengan mempertimbangkan dampak-dampaknya di masa depan. Ketika merumuskan suatu kebijakan, seseorang harus mempertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut dan mengapa kebijakan tersebut dilaksanakan.
5. Akuntabilitas finansial ini merupakan tanggung jawab organisasi publik untuk menggunakan dana publik (uang publik) secara ekonomis, efisien dan efektif, tanpa pemborosan, kehilangan dana atau korupsi. Tanggung jawab keuangan penting karena merupakan tujuan utama perusahaan. Tanggung jawab ini mengharuskan lembaga publik untuk memberikan

laporan keuangan yang menggambarkan kinerja keuangan organisasi kepada pihak ketiga.

2.2.2 Transparansi

Transparansi mengenai informasi keuangan tersedia bagi publik berdasarkan peninjauan kembali. Masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh mengenai akuntabilitas suatu organisasi atau pemerintahan. Dengan transparansi tersebut, setiap orang dapat memperoleh informasi tentang kegiatan yang diselenggarakan organisasi secara terbuka (Kholmi 2022).

Transparansi merupakan upaya yang di lakukan secara sadar (sengaja) untuk memberikan seluruh informasi yang dapat di publikasikan secara sah/legal baik positif ataupun negative dengan akuntabel, *on time*, selaras, dan eksplisit. Transparansi bertujuan untuk menambah kapasitas daya fikir logis masyarakat luas dan menjaga tanggung jawab organisasi terkait dengan aktivitas, kebijakan dan aplikasinya (Setyo 2020).

Prinsip transparansi Werimon mencakup dua aspek, yaitu: media massa pemerintah dan hak warga negara untuk mengakses informasi. Pemerintah hendaknya menjalin komunikasi yang mendalam dengan masyarakat mengenai berbagai persoalan dalam konteks pembangunan yang berkaitan dengan masyarakat. Masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui berbagai hal yang dilakukan pemerintah dalam menjalankan tugasnya.

Kerangka konseptual untuk meningkatkan transparansi dalam organisasi sektor publik memerlukan empat elemen, antara lain:

- 1) Adanya sistem pelaporan keuangan;
- 2) Adanya sistem pengukuran kinerja;
- 3) Melakukan audit sektor publik; dan
- 4) Penyelenggaraan saluran akuntabilitas publik (accountability channel).

Selain itu, anggaran yang disiapkan oleh moderator dianggap transparan jika memenuhi kriteria berikut:

- 1) Telah mengumumkan kebijakan fiskal;
- 2) Ketersediaan dokumen anggaran dan kemudahan aksesibilitas;
- 3) Menyediakan laporan pertanggungjawaban tepat waktu;
- 4) Mempertimbangkan suara/saran masyarakat;
- 5) Memiliki sistem informasi publik (Istiqomah 2017).

2.2.2.1 Ekonomi dan Transparansi Pemerintah Daerah

Menurut Kamus Bisnis (2016), perekonomian adalah keseluruhan jaringan produsen, distributor, dan konsumen barang dan jasa dalam komunitas lokal, regional, atau nasional. Beberapa penelitian yang menggunakan dimensi ekonomi dalam penelitian transparansi adalah Sol (2013) dan Guillamon (2011), dengan variabel pengangguran dan aktivitas ekonomi. Menurut BPS, tingkat pengangguran terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap total angkatan kerja. Selain itu, pengangguran terdaftar yang masuk dalam klasifikasi perhitungan TPT pemerintah daerah adalah penduduk angkatan kerja pemerintah daerah,

termasuk dalam kelompok penduduk yang tidak memiliki pekerjaan karena tidak percaya dengan tersedianya lapangan pekerjaan. diperoleh, warga yang sedang mencari pekerjaan karena belum mempunyai pekerjaan tertentu, warga yang sedang berusaha mempersiapkan suatu usaha sebagai bentuk pekerjaan, dan warga yang harus mulai mengerjakan apa yang diterimanya.

Kegiatan ekonomi menurut Kamus Bisnis (2016) adalah kegiatan yang berkaitan dengan produksi, distribusi dan konsumsi barang dan jasa di semua lapisan masyarakat. Produk domestik bruto (PDB) adalah ukuran aktivitas ekonomi, tingkat aktivitas ekonomi saat ini, dan tingkat aktivitas ekonomi yang diharapkan di masa depan, yang dapat berdampak signifikan terhadap aktivitas bisnis dan keuntungan, serta inflasi dan suku bunga. harga. Produk Domestik Bruto Daerah (PDRB) merupakan indikator yang lebih tepat digunakan untuk melihat aktivitas dan aktivitas perekonomian suatu daerah. (Muhtar, Putro, dan Sutaryo 2017).

2.2.3 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kumpulan informasi yang tercatat merupakan gambaran kegiatan pemerintah selama suatu periode akuntansi dan dikenal dengan laporan keuangan. Setiap organisasi pemerintahan sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan keuangan daerah wajib menyusun laporan keuangan. Berdasarkan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan-laporan tersebut disajikan untuk satu periode akuntansi. Penyusunan dan penyajian LKPD harus didasarkan pada standar akuntansi atau peraturan yang ditetapkan oleh

standar akuntansi pemerintahan atau pemerintahan. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mengatur bahwa laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah juga harus memenuhi karakteristik kualitatif, antara lain relevansi, keandalan, daya banding, dan kejelasan. Informasi yang dihasilkan oleh laporan keuangan harus berorientasi pada respons, tepat waktu, dapat diprediksi, dan lengkap agar relevan.

Laporan keuangan SKPD merupakan hasil kerja konstituennya, artinya kualitas pelaporan keuangan menunjukkan kualitas kerja yang dipengaruhi oleh kompetensi konstituennya. Hal ini sesuai dengan pandangan Harun bahwa penyusunan laporan keuangan pemerintah memerlukan staf yang berkualitas untuk menyusun laporan keuangan yang memenuhi standar internasional. (Bagjana and Rachman 2021).

2.2.3.1 Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang berkualitas yang dapat disajikan dengan kepastian yang wajar mempunyai kriteria khusus yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, apabila laporan tersebut memenuhi kriteria kekhususan nilai mutu laporan keuangan yaitu relevansi, dapat diandalkan, dapat dipahami dan sebanding. Yanti (2021) Kualitas laporan keuangan daerah diartikan sebagai tingkat kualitas atas suatu pelaporan keuangan transaksi layanan publik di tingkat daerah yang dinilai berdasarkan aktualitas dan ketetapan pencatatan transaksi yang dilakukan berdasarkan pada realita transaksi yang dilakukan di dalam periode penulisan tertentu (Yusri 2022).

Kualitas laporan keuangan erat kaitannya dengan penyajian laporan keuangan. Penyampaian laporan keuangan yang tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan bukti transaksi yang tidak dapat dilacak dapat menyebabkan buruknya kualitas laporan keuangan. Selain itu, adanya kebijakan akrual lembaga operasional tanpa bukti akrual seperti penurunan nilai aset, penyisihan kerugian kredit, perubahan metode pencatatan persediaan juga dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan. (Firmansyah, Yuniar, dan Arfiansyah 2022).

Fenomena terkait kualitas laporan keuangan saat ini semakin kontroversial. Banyaknya kasus pelaporan keuangan pemerintah daerah yang buruk di Indonesia masih menjadi isu hangat yang memerlukan penyelidikan lebih lanjut. Hal ini mencerminkan kurangnya pemahaman terhadap standar akuntansi pemerintahan dan buruknya sistem pengendalian internal serta ketidakmampuan staf akuntansi sehingga dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan perusahaan pemerintah daerah. Pemerintah Indonesia perlu memperbaiki pengelolaan keuangan negara untuk menghadapi kondisi tersebut. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia telah menetapkan otonomi daerah yang dicanangkan pemerintah yang mewajibkan pemerintah pusat atau daerah untuk memberikan informasi yang transparan dan akuntabel. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta hukum digital. 24/2005 tentang standar akuntansi pemerintahan dan PP No. 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan (Sihite dan Holiawati 2017).

2.2.4 Organisasi Perangkat Daerah

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Dalam memimpin pemerintahan, OPD tentu mempunyai standar yang harus dijunjung tinggi demi kepentingan masyarakat. (Ermawati and Arumsari 2020)

Menurut Sutaryo (2018) menyusun standar audit internal pemerintah Indonesia untuk menjaga kualitas hasil audit internal dan memungkinkan APIP berperan efektif. Untuk dapat menjalankan perannya secara efektif, APIP setidaknya harus melakukan tiga hal dalam organisasinya, yaitu *assurance activities*, *anti corruption activities*, and *consulting activities*. Kajian tersebut bermanfaat bagi organisasi perangkat daerah dalam mengambil keputusan untuk meningkatkan efektivitas audit internalnya berdasarkan faktor-faktor seperti keahlian profesional, kualitas pekerjaan audit, status pekerjaan dan ketenagakerjaan, tahapan, dukungan kepemimpinan, dan ruang lingkup pekerjaan audit internal, sehingga organisasi regional dapat memperbaiki faktor-faktor tersebut untuk meningkatkan efektivitas dalam menjalankan fungsi audit internalnya. Lebih lanjut, penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teori audit internal khususnya pada organisasi pemerintah yang memerlukan pengembangan.

APIP adalah lembaga pemerintah yang dibentuk dengan misi melaksanakan pengendalian intern pada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah. APIP terdiri atas (1) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), (2)

Inspektur Jenderal/Inspektur/Satuan Pengawasan Intern Kementerian/Kementerian Negara, (3) Inspektur Utama/Inspektur instansi pemerintah di luar industri, (4) Pengawas/Satuan Pengawasan Intern sekretariat lembaga tinggi negara dan lembaga negara, (5) Pengawas internal/kabupaten/kota dan (6) Pengawasan internal badan hukum pemerintah lainnya sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang. Perluasan peran APIP menyebabkan terjadinya perubahan paradigma terkait tugas dan fungsi APIP dalam melakukan pengawasan internal. Bentuk pengendalian yang dilakukan APIP sebelum tahun 2008 masih dianggap “antagonis”, mengingat kegiatan pengendalian internal meremehkan manajemen, namun saat ini telah menjelma menjadi kemitraan dalam organisasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dalam hal ini OPD tidak lagi menjadi subjek melainkan peserta aktif konsultasi dengan pemeriksaan sebagai APIP sehingga konsultasi dapat menjadi tindakan preventif dan remedial dalam pelaksanaan kerja pemerintah. Dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas internal pemerintah, APIP dinilai oleh BPKP sebagai badan pengawas APIP di Indonesia. Penilaian kapasitas APIP dilakukan oleh BPKP dengan menggunakan model penilaian Internal Audit Competency Model (IACM) yang dikembangkan oleh The Institute of Internal Auditors (IIA). (Herubawa dan Ali 2019).

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai analisis Organisasi Perangkat Daerah dalam memediasi akuntabilitas dan transparansi terhadap kualitas laporan keuangan daerah telah dilakukan oleh penelitian terdahulu. Berikut merupakan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

1. Penelitian terdahulu tentang akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan daerah

Penelitian yang dilakukan oleh Tahir, Malia, dan Faisol (2021) yang meneliti tentang analisis akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Sedangkan penelitian yang dilakukan Setyo (2020) yang meneliti tentang akuntabilitas berpengaruh negative terhadap kualitas laporan keuangan.

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu tentang pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan daerah

No.	Nama Peneliti dan Tahun	Variabel Penelitian	Hasil Peneliti
1.	(Putri dan Akbar 2022)	Y : Kualitas Laporan Keuangan X : Akuntabilitas	Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
2.	(Tahir, Malia, dan Faisol 2021)	Y : Kualitas Laporan Keuangan X : Akuntabilitas	Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan
3.	(Setyo 2020)	Y : Kualitas laporan keuangan daerah X : Akuntabilitas	Akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
4.	(Vidyasari 2021)	Y : Kualitas Laporan Keuangan X : Akuntabilitas	Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

2. Penelitian terdahulu tentang transparansi terhadap kualitas laporan keuangan daerah

Penelitian yang dilakukan Nasution (2019) mengenai analisis transparansi terhadap kualitas laporan keuangan menghasilkan kesimpulan bahwa transparansi berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Sedangkan menurut Alfarizi dan Juniarti (2020) menyimpulkan bahwa tranparansi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Tabel 2.2 Penelitian terdahulu tentang pengaruh transparansi terhadap kualitas laporan keuangan daerah

No	Nama Peneliti dan Tahun	Variabel Penelitian	Hasil Peneliti
1.	(Rahayu dan Dewi 2022)	Y : Kualitas Laporan keuangan X : Transparansi	Transparansi berpengaruh positif terhadap laporan keuangan
2.	(Nasution 2019)	Y : Kualitas laporan keuangan daerah X : Transparansi	Transparansi berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
3.	(Alfarizi dan Juniarti 2020)	Y : Kualitas Laporan Keuangan Daerah X : Transparansi	Transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Daerah.
4.	(Firmansyah, Yuniar, dan Arfiansyah 2022)	Y : Kualitas Laporan Keuangan X : Transparansi	Transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

3. Penelitian terdahulu tentang Organisasi Perangkat Daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah

Penelitian yang dilakukan oleh (Maulana 2021) mengenai Organisasi Perangkat Daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah menghasilkan kesimpulan bahwa organisasi perangkat daerah dalam meningkatkan kualitas laporannya sangat penting. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Herubawa dan Ali (2019) mengenai peran yg dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Tabel 2.3 Penelitian terdahulu tentang Organisasi Perangkat Daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah

No	Nama Peneliti dan Tahun	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	(Maulana 2021)	Y: Kualitas Laporan Keuangan Daerah X : Organisasi Perangkat Daerah	Organisasi Perangkat Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
2.	(Herubawa dan Ali 2019)	Y : Kualitas Laporan Keuangan Daerah X : Organisasi Perangkat Daerah	Organisasi Perangkat Daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

4. Penelitian terdahulu tentang akuntabilitas terhadap Organisasi Perangkat Daerah

Penelitian yang dilakukan oleh Putra (2018) mengenai akuntabilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap Organisasi Perangkat Daerah provinsi Jawa Timur. Sedangkan menurut Herubawa dan Ali (2019) menyimpulkan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh positif terhadap Organisasi Perangkat Daerah.

**Tabel 2.4 Penelitian terdahulu tentang akuntabilitas terhadap
Organisasi Perangkat Daerah**

No	Nama Peneliti dan Tahun	Variabel Penelitian	Hasil Peneliti
1.	(Putra 2018)	Y : Organisasi Perangkat Daerah X : Akuntabilitas	Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap Organisasi Perangkat Daerah.
2.	(Herubawa dan Ali 2019)	Y : Organisasi Perangkat Daerah X : Akuntabilitas	Akuntabilitas tidak berpengaruh positif terhadap Organisasi Perangkat Daerah.

5. Penelitian terdahulu tentang transparansi terhadap Organisasi Perangkat Daerah

Penelitian yang dilakukan oleh Arfan, Darwanis, dan Wahyudi (2021) mengenai transparansi terhadap Organisasi Perangkat Daerah dalam pemerintah daerah menghasilkan kesimpulan Transparansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan OPD kota Aceh. Sedangkan menurut peneliti Ruhbaniah, Agusdin, dan Alamsyah (2017) adanya transparansi belum berpengaruh secara signifikan pada Organisasi Perangkat Daerah Lombok.

**Tabel 2.5 Penelitian terdahulu tentang transparansi terhadap
Organisasi Perangkat Daerah**

No	Nama Peneliti dan Tahun	Variabel Penelitian	Hasil Peneliti
1.	(Firmansyah, Yuniar, dan Arfiansyah 2022)	Y : Organisasi Perangkat Daerah X : Transparansi	Transparansi berpengaruh positif terhadap organisasi perangkat daerah

2.	(Ruhbaniah, Agusdin, dan Alamsyah 2017)	Y: Organisasi Perangkat Daerah X : Transparansi keuangan	Transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap Organsasi Perangkat Daerah.
----	---	---	--

2.4 Kerangka Pemikiran Teoritis dan Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Kerangka Pemikiran Teoritis

Akuntabilitas mempengaruhi dalam hal kualitas laporan keuangan daerah, dengan menerapkan beberapa poin antara lain yaitu akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan, akuntabilitas finansial. hal itu menjadi perhatian dalam melaksanakan laporan keuangan oleh Organisasi Perangkat Daerah. Agar memiliki output yang bisa menjadi baik dan menghasilkan laporan yang akuntabel yaitu laporan yang dapat di pertanggungjawabkan dari sisi manapun.

Transparansi salah satu aspek dalam keberhasilan suatu pengelolaan keuangan daerah yang jujur dan transparan. Organisasi Perangkat Daerah di tuntutan memberikan seluruh informasi yang dapat di publikasikan secara sah/legal baik positif maupun negative.

Praktik transparansi dan akuntabilitas berbeda dari satu negara ke negara lain dan dipengaruhi oleh tingkat pemerintahan, jenis rezim, dan konteks budaya. Hal ini juga merupakan landasan kepercayaan publik terhadap organisasi sektor publik. Castillo dan Gabriel (2020). Sulaiman (2019) transparansi dan akuntabilitas yang merupakan prinsip tanggung jawab pemerintah kepada publik berpengaruh positif

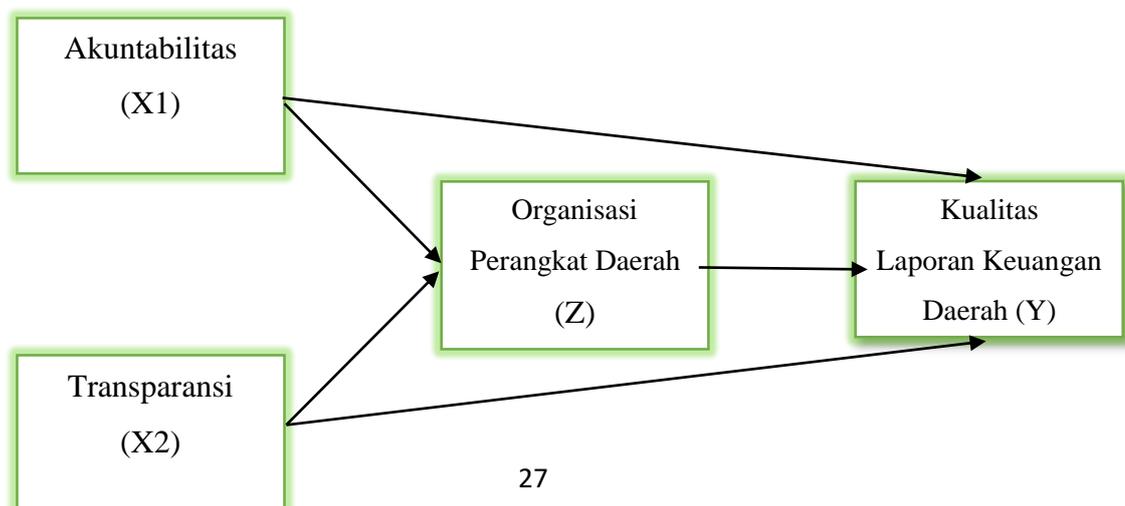
signifikan terhadap kinerja pemerintah. Lebih penting lagi, tata kelola yang baik memiliki dampak yang signifikan pada kualitas dan inefisiensi yang lebih tinggi dalam pengeluaran pemerintah. (Panjaitan dan Adam 2022)

Organisasi Perangkat Daerah sebagai agen untuk masyarakat agar berbuat sesuai dengan pengetahuan dan keyakinannya untuk memaksimalkan dalam proses penganggaran, pengambilan keputusan, hingga penyusunan laporan keuangan yang adil menunjukkan bahwa Organisasi Perangkat Daerah memiliki kinerja yang baik. Hal ini sebagai tuntutan masyarakat terhadap pemerintah agar memberikan system laporan keuangan yang Akuntabel.

Organisasi Perangkat Daerah ikut serta dalam penyelenggaraan birokrasi dalam rangka meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, memperkuat kapasitas seluruh lembaga kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai pedoman tata kelola yang baik. Organisasi Perangkat Daerah berperan dalam membentuk pemerintahan yang transparan dalam laporan keuangan daerah.

Berdasarkan uraian diatas, dapat digambarkan hubungan antar variabel sebagai berikut :

Gambar 2.4 Kerangka Pemikiran



2.4.2 Pengembangan Hipotesis

Mendasarkan pada uraian diatas maka dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut :

1. Pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan daerah

Sesuai dengan *theory agency* yaitu masyarakat yang bertindak sebagai *principal* dan pemerintah sebagai *agen*. Maka dari itu berkaitan dengan tugas pemerintah sebagai *agen* untuk memberikan tanggungjawab terhadap masyarakat sebagai *principal* dalam proses laporan keuangan harus sesuai dengan prinsip akuntabilitas untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah sehingga dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Akuntabilitas dalam pembentukan kualitas laporan keuangan memberikan pengaruh untuk melaksanakan kewajiban mempertanggung jawabkan, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas suatu kegiatan pada suatu daerah tersebut. Adanya penerapan prinsip Akuntabilitas akan mendorong para pegawai instansi pengelolaan keuangan daerah untuk senantiasa memberikan bukti – bukti pertanggung jawaban transaksi yang sesuai dan realita sehingga terhindarkan dari hal – hal yang bersifat curang. Peran pegawai instansi pemerintah dalam melakukan penerapan akuntabilitas sesuai aturan dan ketetapan akan menciptakan kualitas laporan keuangan daerah yang baik.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Akbar (2022), Tahir, Malia, dan Faisol (2021), Setyo (2020), dan Vidyasari (2021) mengatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan

daerah. Maka hipotesis yang dibuat sebagai berikut :

H1 : Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah

2. Pengaruh transparansi terhadap kualitas laporan keuangan daerah

Dalam konteks teori legitimasi, pemerintah daerah ingin menunjukkan kinerjanya kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah lebih transparan dalam menyajikan informasi keuangan kepada masyarakat yang ingin melegitimasi pengelolaan keuangan mereka secara efektif dengan menyajikan laporan keuangan berkualitas tinggi..

Transparansi sebagai unsur keterbukaan dimana segala jenis transaksi dana yang dilakukan tidak terkesan tertutup tetapi lebih terbuka sehingga nilai kejelasan dari transaksi yang dilakukan dapat diketahui secara riil oleh para pemangku kepentingan yaitu masyarakat maupun pemerintah. Adanya penerapan transparansi akan memberikan dorongan kepada aparatur pengelolaan keuangan pemerintahan untuk bersifat lebih terbuka terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi terkait nilai pengeluaran dana dengan detail, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini berdampak terhadap aparatur pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah dengan maksimal sehingga kualitas laporan keuangan yang di hasilkan semakin baik.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nasution (2019), Alfarizi dan Juniarti (2020), dan Firmansyah, Yuniar, dan Arfiansyah (2022), menjelaskan bahwa variabel Transparansi berpengaruh secara signifikan terhadap variabel

laporan keuangan daerah. Hipotesis sebagai berikut:

H2 : Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah

3. Organisasi Perangkat Daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah

Teori kegunaan informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan tercermin dalam bentuk aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh komponen-komponen informasi keuangan agar berguna dalam konteks pengambilan keputusan. Tindakan yang dilakukan pemerintah dengan membandingkan hasil program yang berjalan dengan tahun sebelumnya, menilai kinerja keuangan dan kondisi keuangan, serta menentukan pelaksanaan anggaran yang telah ditetapkan..

Organisasi Perangkat Daerah diartikan sebagai orang yang melaksanakan pekerjaan pemerintahan berupa merencanakan program pengendalian, mengembangkan kebijakan dan sarana pengendalian, memeriksa, menyelidiki, menguji dan mengevaluasi fungsi pengendalian. Peran OPD adalah mencegah terjadinya kecurangan dan pelanggaran dalam rangka meningkatkan kualitas pelaporan keuangan daerah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Maulana (2021) menjelaskan bahwa Organisasi Perangkat Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Maka hipotesis yang dibuat sebagai berikut:

H3 : Organisasi Perangkat Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

4. Pengaruh akuntabilitas terhadap Organisasi Perangkat Daerah

Mendasarkan pada *Agency Theory* menyatakan bahwa akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban organisasi perangkat daerah (*agent*) untuk melaporkan, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala kegiatan dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada masyarakat (*principals*) yang mempunyai hak dan wewenang untuk meminta pertanggungjawaban tersebut..

Akuntabilitas keuangan adalah pertanggungjawaban atas integritas, keterbukaan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Adanya akuntabilitas dalam organisasi perangkat daerah akan berdampak pada penyajian informasi tata kelola kepada masyarakat secara terbuka, tepat waktu, dan akurat. memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan pemerintahan. Hal ini berdampak pada staf Organisasi Perangkat Daerah dalam memberikan presentasi dan laporan keuangan yang baik untuk mewujudkan nilai pelaporan keuangan daerah yang berkualitas.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fitriyani dan Herawati (2019) menjelaskan bahwa akuntabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Organisasi Perangkat Daerah. Maka hipotesis yang dibuat sebagai berikut :

H4 : Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Organisasi Perangkat Daerah

5. Pengaruh transparansi terhadap Organisasi Perangkat Daerah

Pengelolaan keuangan publik yang menerapkan prinsip transparansi akan menghindarkan persepsi – persepsi dan sikap skeptic negative masyarakat terhadap

instansi pemerintah dimana hal ini sejalan dengan *publik choice theory* atau teori pilihan publik dimana dalam teori ini menjelaskan bahwa masyarakat akan mempercayai instansi pemerintah yang mampu memenuhi harapan dan memberikan pelayanan terbaik sehingga menjadi pilihan masyarakat.

Transparansi diartikan sebagai kebebasan akses terhadap kegiatan perekonomian pemerintah, sehingga seluruh pemangku kepentingan mengetahui struktur, pengelolaan keuangan, dan fungsi pemerintah. Adanya transparansi pada organisasi perangkat daerah akan menciptakan rasa saling percaya antara pemerintah dan masyarakat melalui pemberian informasi dan akan menjamin kemudahan akses terhadap informasi yang berdampak pada komunikasi publik pemerintah dalam bentuk laporan keuangan. mudah diakses dan memberikan informasi terbuka tentang proses pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Hal ini juga berdampak pada aparatur pemerintah daerah yang harus selalu terbuka dan transparan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, guna meningkatkan kepercayaan pemerintah dan masyarakat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Firmansyah, Yuniar, dan Arfiansyah (2022) menjelaskan bahwa transparansi berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Organisasi Perangkat Daerah. Maka hipotesis yang dibuat sebagai berikut :

H5 : Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Organisasi Perangkat Daerah

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif. Menurut Sugiyono (2018), metode deskriptif adalah suatu metode penelitian yang digunakan untuk mengetahui keberadaan variabel bebas, baik terhadap suatu variabel atau beberapa variabel (variabel yang berbeda), tanpa membandingkan dan tanpa mencari hubungan antar variabel tersebut. dan variabel lainnya. Dengan kata lain data yang dikumpulkan adalah data numerik yang diperoleh dari hasil penelitian.

3.2. Populasi dan Sampel

3.2.1. Populasi

Populasi adalah suatu wilayah umum yang terdiri dari obyek-obyek atau subyek-subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Menurut Sugiyono (2019), penduduk adalah suatu wilayah umum yang terdiri atas: objek/subjek dengan jumlah dan ciri-ciri tertentu yang diidentifikasi oleh peneliti untuk diteliti dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi penelitian ini meliputi 41 organisasi perangkat daerah di Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah pegawai sebanyak 168 orang.

3.2.2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari suatu populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu. Menurut Sugiyono (2019), sampel adalah bagian dari suatu populasi dan merupakan ciri-ciri yang dimiliki suatu populasi. Kriteria penelitian ini adalah organisasi perangkat daerah mempunyai izin, perencanaan, pemantauan, alokasi, distribusi, dan stabilitas. Unit analisis dalam penelitian ini adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Kepala Bagian Anggaran atau Kepala Bagian Keuangan di 41 Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan total 168 Responden. Peneliti tidak melibatkan Rumah Sakit sebagai objek penelitian Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah karena pada tidak sesuai dengan kriteria frekuensi pekerjaan dari Rumah Sakit yang padat sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan penelitian tersebut serta yang dibutuhkan oleh peneliti salah satunya adalah melakukan pengawasan dan otorisasi dalam kualitas laporan keuangan.

3.3. Sumber dan Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer. Data primer adalah data yang diambil langsung dari responden. Data primer penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari tanggapan kuesioner yang dibagikan kepada responden..

3.4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah survey, dengan menyebarkan kuesioner kepada Staff Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah secara online maupun secara offline menggunakan *paper* dan *Google Form*. Pertanyaan terstruktur terdiri dari beberapa pertanyaan modifikasi dari Hudson et al. (2001) yang melakukan suatu pengukuran berdasarkan persepsi *modified likert-type*, dengan skala pengukuran 5 (1 = sangat tidak setuju, 2 = tidak setuju, 3 = netral, 4 = setuju, 5 = sangat setuju). Kuesioner tersebut ditujukan kepada kepala bagian dan staff yang berkaitan dengan pengelolaan akuntansi sektor publik.

Tabel 3.2 Modified likert-type

Jawaban	Nilai / skor
STS = Sangat Tidak Setuju	1
TS = Tidak Setuju	2
N = Netral	3
S = Setuju	4
SS = Sangat Setuju	5

3.5. Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Definisi kegiatan adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel, seperti memberi makna atau menjelaskan sifat-sifat teknis suatu kegiatan sehingga peneliti dapat mengamati dan menguji variabel-variabel tersebut serta mempelajarinya. Penelitian ini kemudian menjadi penelitian ilmiah. Menurut Sugiyono (2018), variabel penelitian adalah segala sesuatu yang didefinisikan oleh peneliti dan perlu dipelajari untuk memperoleh informasi tentangnya dan kemudian menarik kesimpulan. Sesuai dengan judul penelitian yang dipilih penulis sebagai

analisis organisasi perangkat daerah dalam mengatur akuntabilitas dan transparansi kualitas pelaporan keuangan daerah, maka peneliti mengelompokkan variabel-variabel sebagai berikut: yang digunakan dalam penelitian ini menjadi variabel independen (X) dan variabel dependen (Y).

Adapun penjelasan variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang diharapkan mempunyai pengaruh independen terhadap variabel dependen. Menurut Sugiyono (2018), variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau menyebabkan perubahan atau terjadinya variabel dependen. Terdapat dua variabel independen dalam penelitian ini, yaitu: Struktur Akuntabilitas (X1) dan Transparansi (X2)

b. Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Selanjutnya variabel dependen disebut juga variabel terikat karena variabel ini dipengaruhi atau merupakan akibat dari adanya variabel bebas (independen). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikatnya adalah kualitas pelaporan keuangan daerah (Y1) dan organisasi perlengkapan daerah (Z).

Tabel 3.3

Definisi Variabel

No	Nama Variabel	Definisi Variabel	Pengukuran Variabel	Skala	Sumber
1	Kualitas Laporan Keuangan Daerah	Kualitas laporan keuangan daerah adalah suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintah daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Relevansi 2. Reliabel (Andal) 3. Dapat Dibandingkan 4. Mudah Dipahami 	Likert 1 -5	(Ni Made Sudiarianti)
2	Akuntabilitas	Akuntabilitas merupakan bentuk dari pertanggungjawaban baik secara finansial, maupun ketaatan pada peraturan yang berlaku. Akuntabilitas salah satu kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akuntabilitas hokum dan kejujuran 2. Akuntabilitas manajerial 3. Akuntabilitas program 4. Akuntabilitas kebijakan 5. Akuntabilitas finansial 	Likert 1 -5	(Septiawati)
3	Transparansi	Transparansi adalah asas agar setiap orang dapat memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan dan terjaminnya kebebasan untuk mengakses informasi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah terhadap	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian Laporan Keuangan melalui media baik Elektronik maupun Massa. 2. Kelengkapan informasi terkait dengan pencatatan Laporan Keuangan 	Likert 1 -5	(Septiawati)

		masyarakat, proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, serta hasil yang telah dicapai.	3. Pembaruan informasi pencatatan 4. Kemudahan akses informasi public		
4	Organisasi Perangkat Daerah	Organisasi Perangkat Daerah adalah bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kinerja Pemerintah, membangun kapasitas seluruh lembaga kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pokok sesuai dengan arahan tata pemerintahan yang baik	1. Opini atas Laporan Keuangan Daerah 2. Penilaian Maturitas SPIP 3. Level Kapabilitas APIP	Likert 1 -5	(Megalinda Donulawan g Asdaf)

3.6. Teknik Analisis

Teknik analisis data ini menjelaskan metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis yang mendasari penelitian ini. Penelitian ini menggunakan analisis data kuantitatif. Menganalisis data kuantitatif sebagai data numerik (numerik) dan mengukur variabel beserta penjelasan setiap perhitungan yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan alat analisis statistik berupa SPSS versi 26..

3.6.1 Uji Kualitas Data

3.6.1.1 Uji Validitas Data

Uji validitas merupakan pengujian untuk menunjukkan keakuratan suatu instrumen pengukuran, dengan kata lain dapat digunakan untuk memeriksa keabsahan pernyataan-pernyataan yang telah dikumpulkan dan digunakan untuk

mengukur suatu variabel. Uji ini menggunakan *pearson correlation* dengan cara menghitung korelasi dari setiap pertanyaan. Uji validitas dilakukan dengan cara membandingkan r tabel dengan r hitung, jika r hitung $>$ r tabel maka instrument dikatakan valid, begitu pula sebaliknya jika r hitung $<$ r tabel maka instrument dikatakan tidak valid.

3.6.1.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah pengujian yang mengukur kestabilan antara pengamatan yang dilakukan dalam suatu kuesioner pada waktu yang berbeda. Tolak ukuran uji reliabilitas menggunakan sebuah metode yaitu *Cronbach Alpha*. Yang menyimpulkan hasil, jika nilai *Cronbach Alpha* $>$ 0,06 maka variabel tersebut dapat dinyatakan reliabel.

3.6.2. Uji Asumsi Klasik

Pengujian hipotesis klasik bertujuan untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang dihasilkan tepat dalam estimasinya, tidak bias dan konsisten. Pengujian yang dilakukan meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas.

3.6.2.1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk memeriksa apakah dalam model regresi variabel perancu atau residu berdistribusi normal atau tidak. Penelitian ini menggunakan uji normalitas melalui analisis statistik. Pengecekan statistik sederhana dapat dilakukan dengan melihat nilai kurtosis dan skewness dari residunya. Nilai z statistik untuk skewness dapat dihitung dengan rumus :

Skewness

$$Z_{\text{skewness}} = \frac{\text{Skewness}}{\sqrt{6/N}}$$

Sedangkan nilai z kurtosis dapat dihitung dengan rumus :

$$Z_{\text{kurtosis}} = \frac{\text{Kurtosis}}{\sqrt{24/N}}$$

3.6.2.2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk memeriksa apakah model regresi menemukan adanya korelasi antar variabel independen. Variabel ortogonal adalah variabel bebas yang nilai antar variabel bebasnya adalah nol (0). Pada penelitian ini indeks nilai VIF (nilai toleransi dan faktor inflasi) digunakan untuk memeriksa multikolinearitas pada penelitian ini. Dengan nilai tes yang baik, yaitu dengan indeks toleransi $> 0,10$ dan $VIF < 10 > 10$, maka terjadi korelasi yang terlalu besar antara salah satu variabel independen dengan variabel independen lainnya, atau terjadi multikolinearitas.

3.6.2.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk memeriksa apakah dalam model regresi terdapat ketimpangan varians residu dari pengamatan yang satu ke

pengamatan yang lain. Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada tidaknya ketimpangan varians pada residual dalam model regresi. Periksa apakah dalam model regresi terdapat ketimpangan varians antara residu pengamatan yang satu dengan pengamatan yang lain. Beberapa kriteria digunakan untuk menguji Heteroskedastisitas, yang ditunjukkan dengan nilai signifikan. Jika variabel independen mempunyai nilai signifikan kurang dari 0,10 maka terdapat Heteroskedastisitas. Sedangkan jika variabel independen mempunyai nilai signifikan lebih besar dari 0,10 maka tidak terjadi varians pada variabel independen.

3.6.3. Teknik Analisis Data

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dalam pengolahan data. Analisis regresi berganda merupakan perluasan dari analisis regresi sederhana yang mencakup dua atau lebih variabel independen (bebas) terhadap variabel dependen (terkait). Analisis ini digunakan untuk mengestimasi nilai variabel dependen dengan menggunakan lebih dari satu variabel independen, seperti dalam penelitian ini analisis tersebut dapat digunakan untuk mengetahui PENGARUH ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DALAM MEMEDIASI HUBUNGAN ANTARA AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH. Pengolahan data untuk analisis regresi linier berganda ini dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS (Statistica Program and Service Solution) versi 26.

Adapun model persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Z = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon_i$$

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 Z + \varepsilon_i$$

Keterangan :

Y = Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Z = Organisasi Perangkat Daerah

α = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien Regresi

X1 = Akuntabilitas

X2 = Transparansi

ε = Residual (error)



3.6.4. Uji Kelayakan Model

a. Uji F

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi dikatakan layak atau tidak layak untuk digunakan. Adapun kriteria yang digunakan dalam uji F yaitu :

- 1) Apabila nilai signifikansi $< 0,10$ atau $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_a diterima dan H_o ditolak. Artinya terdapat pengaruh secara simultan (bersama-sama) antara variabel dependen (X) terhadap variabel dependen (Y).
- 2) Apabila nilai signifikansi $> 0,10$ atau $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_o diterima dan H_a ditolak. Artinya tidak terdapat pengaruh secara simultan (bersama-sama) antara variabel dependen (X) terhadap variabel dependen (Y).

b. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui besarnya kontribusi pengaruh variabel bebas terhadap variabel dependen. Adapun kriteria dalam melakukan pengujian koefisien determinasi menurut Ningrum dan Mildawati (2020), yaitu sebagai berikut :

- 1) Jika nilai R^2 kecil, maka menunjukkan bahwa kemampuan variabel bebas (independen) dalam menjelaskan variabel dependen terbatas.
- 2) Jika nilai R^2 sama dengan 0, maka menunjukkan bahwa variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
- 3) Jika nilai R^2 mendekati satu, maka menunjukkan bahwa variabel independen dapat memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.

c. Uji Parsial (Uji Statistik t)

Uji parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. Langkah – langkah dalam pengujiannya adalah sebagai berikut:

Perumusan Hipotesis

- 1) $\beta_1 \leq 0$, artinya akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
 $\beta_1 > 0$, artinya akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah
- 2) $\beta_2 \leq 0$, artinya transparansi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
 $\beta_2 > 0$, artinya transparansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
- 3) $\beta_3 \leq 0$, artinya Organisasi Perangkat Daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
 $\beta_3 > 0$, artinya Organisasi Perangkat Daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
- 4) $\beta_4 \leq 0$, artinya akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap Organisasi Perangkat Daerah
 $\beta_4 > 0$, artinya akuntabilitas berpengaruh positif terhadap Organisasi Perangkat Daerah
- 5) $\beta_5 \leq 0$, artinya transparansi tidak berpengaruh terhadap Organisasi Perangkat Daerah

$\beta_5 > 0$, artinya transparansi berpengaruh positif terhadap Organisasi

Perangkat Daerah

Menentukan tingkat signifikan (α) yaitu sebesar 0,05

Menentukan kriteria penerimaan / penolakan H_0 . Jika signifikansi $< 0,05$ maka H_0 ditolak atau H_a diterima, jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka H_0 diterima atau H_a ditolak.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Distribusi Penyebaran Kuesioner

Penelitian ini menggunakan responden beberapa Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh birokrasi daerah dalam mengatur akuntabilitas dan transparansi terhadap kualitas pelaporan keuangan, 41 organisasi perangkat daerah di provinsi Jawa Tengah. . Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa tanggapan kuesioner yang dibagikan kepada responden. antara lain Kepala Sub Bagian, Bendahara Pengeluaran, Verifikator, Penyusunan Laporan Keuangan/Akuntansi dan Tenaga Admin/Inputer. Dengan menggunakan teknik sampling jenuh, jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 168 responden. Kuesioner disebarlang langsung ke lapangan (*Field Survey*).

Tabel 4.1 Penyebaran Kuesioner

Keterangan	Jumlah
Kuesioner yang disebarlang	168
Kuesioner yang kembali	85
Kuesioner tidak sah	0
Kuesioner yang digunakan data	85
Respon rate	50,59%

Sumber : Data Primer yang telah diolah, 2023

Berdasarkan table diatas, dari 168 (100%) kuesioner yang disebar, 85 (50,59%) di terima kembali. Dan kuesioner yang diterima kembali tidak ada, kuesioner yang tidak sah sehingga jumlah kuesioner yang diolah berjumlah 85 data.

4.1.2 Karakteristik Responden

Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentase
Laki – Laki	32	37,7%
Perempuan	53	62,3%
Total	85	100%

Sumber : Data Primer yang telah diolah,2023

Dari table 4.2 diketahui bahwa sebagian besar responden dalam penelitian ini adalah perempuan dengan total 62,3%. Berdasarkan table diatas menunjukkan bahwa di Organisasi Perangkat Daerah dalam penelitian ini, yang mendominasi adalah pegawai perempuan yang berkedudukan sebagai kepala sub bagian, bendahara pengeluaran, verifikator, penyusunan laporan keuangan (akuntansi), tenaga admin/inputer.

Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia	Frekuensi	Presentase	Klasifikasi
Usia 26 – 35	23	27,1%	Masa dewasa awal
Usia 36 – 45	30	35,2%	Masa dewasa akhir
Usia 46 – 55	23	27,1%	Masa lansia awal
Usia 56 – 65	9	10,6%	Masa lansia akhir
Total	85	100%	

Sumber : Data Primer yang telah diolah, 2023

Berdasarkan table 4.3 dapat diketahui bahwa dalam penelitian ini karakteristik usia yang digunakan ada 4 kelompok yaitu : Usia 26 – 35, 36 –

45, 46 – 55, dan 56 – 65. Dalam hal ini rentan usia terkecil di organisasi perangkat daerah pada penelitian ini adalah masa lansia akhir dengan presentase 10,6% sedangkan untuk rentan usia terbesar pada masa dewasa akhir dengan presentase 35,2%. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai organisasi perangkat daerah Jawa Tengah ini di dominasi oleh usia dewasa akhir.

Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentase
SMA	28	33%
D3	12	14,1%
S1	38	44,7%
S2	7	8,2%
Total	85	100%

Sumber : Data Primer yang telah diolah, 2023

Berdasarkan table 4.4 dapat diketahui bahwa karakteristik tingkat pendidikan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 4 tingkatan yaitu SMA, D3, S1, dan S2. Dalam penelitian ini, responden dengan pendidikan Strata Satu (S1) memiliki jumlah frekuensi terbanyak dibandingkan dengan jenjang pendidikan lainnya yaitu 44,7%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai di organisasi perangkat daerah Jawa Tengah yang menduduki jabatan sebagai kepala sub bagian, bendahara pengeluaran, verifikator, penyusunan laporan keuangan (akuntansi) dan tenaga admin/inputer memiliki jenjang pendidikan yang tinggi.

Tabel 4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan

Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentase
Kepala Sub Bagian	10	11,8%
Bendahara Pengeluaran	24	28,2%

Verifikator	24	28,2%
Penyusunan Laporan Keuangan/Akuntansi	13	15,3%
Tenaga Admin/Inputer	14	16,5%
Total	85	100%

Dari table 4.5 dapat dilihat bahwa responden dalam penelitian ini adalah Kepala Sub Bagian memiliki presentase 11,8% paling sedikit dari jabatan lainnya, sedangkan untuk Bendahara Pengeluaran dan Verifikator sama - sama memiliki presentase terbanyak dengan total 28,2%. Maka dari itu dalam penelitian ini jabatan yang dimiliki oleh rata – rata pegawai organisasi perangkat daerah Jawa Tengah adalah Bendahara Pengeluaran dan Verifikator.

4.2 Hasil Uji Kualitas Data

4.2.1 Hasil Uji Validitas Data

Uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode *product moment*, berdasarkan keputusan apakah tingkat signifikannya kurang dari 0,05 atau $r_{hitung} > r_{table}$ (lihat table $r_{product}$ yang dihasilkan tergantung jumlah sampel yang digunakan), maka validnya pertanyaan pada kuesioner terpenuhi. Berikut merupakan hasil uji validitas data dalam penelitian ini.

Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas Data

Variabel		Item	r hitung	r table	Keterangan
X1	Akuntabilitas	1	0,779	0,213	Valid
		2	0,740		Valid

		3	0,646		Valid
		4	0,542		Valid
		5	0,630		Valid
X2	Transparansi	1	0,789	0,213	Valid
		2	0,510		Valid
		3	0,523		Valid
		4	0,714		Valid
Y	Kualitas	1	0,580	0,213	Valid
	Laporan	2	0,703		Valid
	Keuangan	3	0,577		Valid
		4	0,659		Valid
Z	Organisasi	1	0,690	0,213	Valid
	Perangkat	2	0,746		Valid
	Daerah	3	0,688		Valid

Sumber : Data Primer yang telah diolah, 2023

Berdasarkan tabel di atas terlihat jelas bahwa hasil uji validitas data dari variabel independen adalah akuntabilitas, transparansi dengan variabel dependen adalah kualitas laporan keuangan dan variabel memediasi adalah organisasi perangkat daerah. dapat dihitung nilai r hitung $>$ r tabel. Mengingat pada product moment dengan jumlah N yang digunakan adalah 85, yang menunjukkan bahwa nilai r pada sig 0,05 (two tail) adalah 0,213. Hal ini dapat diartikan bahwa seluruh pertanyaan dalam kuesioner penelitian ini dan variabel yang digunakan adalah valid.

4.2.2 Hasil Uji Realibilitas

Uji realibilitas dalam penelitian ini menggunakan metode *Cronbach Alpha*, jika *Cronbach Alpha* > 0,60 maka variabel tersebut dikatakan reliable tetapi jika *Cronbach Alpha* < 0,60 maka variabel dikatakan tidak reliable (Ghozali, 2018). Berikut hasil uji reliabilitas pada penelitian ini.

Tabel 4.7 Hasil Uji Realibilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Akuntabilitas	0,740	Reliabel
Transparansi	0,693	Reliabel
Kualitas Laporan Keuangan	0,723	Reliabel
Organisasi Perangkat Daerah	0,732	Reliabel

Sumber : Data Primer yang telah diolah, 2023

Berdasarkan hasil pada table diatas dapat diketahui bahwa hasil uji realibilitas untuk masing – masing variabel dapat dilihat dari variabel independen yaitu akuntabilitas yang mendapat nilai *Cronbach Alpha* sebesar 0,740. Transparansi mencapai nilai *Cronbach Alpha* sebesar 0,693. Sedangkan variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan dalam penelitian ini diperoleh nilai *Cronbach Alpha* sebesar 0,723. Serta variabel intervening mendapat nilai *Cronbach Alpha* sebesar 0,732. Dapat disimpulkan bahwa hasil uji realibilitas masing – masing variabel memperoleh *Cronbach Alpha* > 0,60, sehingga semua variabel dinyatakan reliable atau dapat dipercaya.

4.3 Analisa Data

4.3.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau gambaran mengenai variabel akuntabilitas, transparansi, kualitas laporan keuangan, dan organisasi daerah yang digunakan dalam penelitian. Dalam statistik deskriptif ini digunakan alat deskriptif yaitu nilai terendah (minimum), nilai tertinggi (maksimum), mean (rata-rata) dan simpangan baku (standar deviasi). Minimum digunakan untuk menunjukkan nilai data minimum. Maksimum digunakan untuk menunjukkan nilai data maksimum. Mean (rata-rata) digunakan untuk menunjukkan rata-rata data yang bersangkutan. Standar deviasi digunakan untuk menunjukkan seberapa berbedanya data yang dipermasalahkan dengan data rata-rata.

Tabel 4.8

Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
AKUNTABILITAS	85	17	25	20.46	2.286
TRANSPARANSI	85	12	20	15.64	2.324
KUALITAS LAPORAN KEUNGAN	85	12	20	16.72	2.234
OPD	85	8	15	11.49	2.051
Valid N (listwise)	85				

Sumber : Data Primer yang telah diolah

Tabel 4.8 adalah Tabel tersebut menunjukkan statistik deskriptif dari variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Tabel ini digunakan untuk mengetahui minimum, maksimum, dan standar deviasi setiap variabel dalam penelitian ini. Tabel tersebut menunjukkan bahwa jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 85 responden organisasi perangkat daerah Jawa Tengah.

1. Akuntabilitas

Variabel akuntabilitas pada kuesioner terdiri dari lima indikator yakni akuntabilitas kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan, dan akuntabilitas finansial. Kelima indikator tersebut terdiri dari 5 pernyataan. Pada variabel Akuntabilitas nilai minimal 17 dan maksimal 25 dengan nilai rata – rata 20,46 dan standar deviasi nya adalah 2.286

2. Transparansi

Variabel Transparansi pada kuesioner terdiri dari empat indikator yakni penyampaian laporan keuangan melalui media elektronik maupun massa, kelengkapan informasi, pembaharuan informasi pencatatan, dan kemudahan akses. Keempat indikator tersebut terdiri dari 4 pernyataan. Pada variabel Transparansi nilai minimal 12 dan maksimal 20 dengan nilai rata – rata 15,64 dan standar deviasi nya adalah 2.324

3. Kualitas Laporan Keuangan

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan. Berdasarkan table diatas, hasil analisis dengan menggunakan statistic deskriptif terhadap kualitas laporan keuangan menunjukkan nilai terendah 12 dan nilai tertinggi 20 dengan rata – rata sebesar 16,72 dan standar deviasi 2.234

4. Organisasi Perangkat Daerah

Variabel intervening dalam penelitian ini adalah organsiasi perangkat daerag. Berdasarkan table diatas, hasil analisis dengan menggunakan statistic deskriptif terhadap organisasi perangkat daerah menunjukkan nilai terendah 8 dan nilai tertinggi 15 dengan rata – rata sebesar 11,49 dan standar deviasi 2.051

4.4 Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan dengan menggunakan beberapa uji, antara lain uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

4.4.1 Hasil Uji Normalitas

Menurut (Ghozali,2018) uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel atau residual berdistribusi normal. Metode uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan uji statistic non parametic *Kolmogrov Smirnov*. Data berdistribusi normal jika hasil *Kolmogrov Smirnov*

menunjukkan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 (Ghozali, 2018). Adapun hasilnya adalah sebagai berikut

Tabel 4.9 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		85
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.29501081
Most Extreme Differences	Absolute	.077
	Positive	.077
	Negative	-.066
Test Statistic		.077
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber : Data Primer yang telah diolah, 2023

Berdasarkan table 4.9 menunjukkan bahwa uji normalitas pada model regresi dengan sampel yang ditetapkan sebanyak 85, setelah diuji normalitas menggunakan *Kolmogorov Smirnov* diperoleh nilai tingkat signifikansi sebesar 0,200 yang menunjukkan lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut residual berdistribusi secara normal.

4.4.2 Hasil Uji Multikolinieritas

Tujuan dari uji multikolinieritas ini adalah untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat korelasi yang sempurna antara variabel independen (Ghozali, 2018). Untuk menguji ada tidaknya multikolinieritas dalam penelitian ini dapat dilihat dengan melihat nilai tolerance dan VIF

(*Variance Inflation Factor*). Hasil uji multikolinieritas disajikan pada table dibawah ini.

Tabel 4.10 Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Variabel	Perhitungan		Keterangan
		Tolerance	VIF	
1	Akuntabilitas	,449	2.226	Tidak terjadi Multikolinieritas
	Transparansi	,449	2.226	Tidak terjadi Multikolinieritas
2	Akuntabilitas	,313	3.192	Tidak terjadi Multikolinieritas
	Transparansi	,427	2.340	Tidak terjadi Multikolinieritas
	Kualitas Laporan Keuangan	,388	2.575	Tidak terjadi Multikolinieritas

Sumber : Data Primer yang telah diolah, 2023

Hasil pengujian pada table diatas menunjukkan bahwa pengujian multikolinieritas semua variabel bebas memiliki nilai tolerance lebih besar dari 10% (0,10) dan nilai VIF kurang dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinieritas dan dapat digunakan untuk memperkiraan hal – hal yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

4.4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Tujuan pengujian ini adalah untuk memeriksa apakah terdapat ketimpangan variance dalam model regresi antara residu pengamatan yang satu dengan pengamatan yang lain. Jika variance residual dari satu observasi ke observasi lainnya tetap ada, kita menyebutnya homokedastisitas dan jika berbeda, kita menyebutnya heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji *glesjser*. Kriteria keputusan dalam uji *glesjser*

adalah jika nilai Sig. > 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas, dan jika nilai Sig. < 0,05 maka terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 4.11 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Variabel	Signifikansi	Keterangan
1	Akuntabilitas	0,363	Homoskedastisitas
	Transparansi	0,559	Homoskedastisitas
2	Akuntabilitas	0,783	Homoskedastisitas
	Transparansi	0,517	Homoskedastisitas
	Kualitas Laporan Keuangan	0,814	Homoskedastisitas

Sumber : Data Primer yang telah diolah, 2023

Berdasarkan table diatas dapat diketahui bahwa data semua variabel memperoleh nilai Sig. lebih dari 0,05. Hal ini dapat menunjukkan bahwa model regresi dalam penelitian ini layak untuk memprediksi factor – factor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

4.5 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda bertujuan untuk menjelaskan sejauh mana pengaruh *independent variabel* dan *dependent variabel*. Hasil regresi dengan bantuan program pengolahan data SPSS tentang Pengaruh organisasi perangkat daerah jawa tengah dalam memediasi akuntabilitas dan transparansi terhadap kualitas laporan keuangan adalah :

Tabel 4.12 Model Persamaan Regresi

Model 1

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		

1	(Constant)	-1.275	1.392		-0.916	.362
	AKUNTABILITAS	.389	.101	.434	3.861	.000
	TRANSPARANSI	.307	.099	.348	3.094	.003

Sumber : Data Primer yang telah diolah 2023

Dari pengujian regresi linier berganda yang tersaji pada table 4.12, diperoleh persamaan sebagai berikut :

$$Z = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \epsilon_i$$

$$Z = -1,275 + 0,389X_1 + 0,307X_2 + \epsilon$$

Dari persamaan regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Nilai konstanta yang didapat dari persamaan regresi sebesar -1,275 dapat diartikan bahwa jika variabel akuntabilitas dan transparansi nilainya adalah konstan atau tetap, maka nilai dari variabel Organisasi Perangkat Daerah sebesar -1,275 satuan.

2. Akuntabilitas (X1)

Pada persamaan regresi linier berganda diketahui bahwa nilai koefisien akuntabilitas sebesar 0,389 artinya jika variabel bebas lain nilainya konstan dan Akuntabilitas mengalami kenaikan 1 satuan, maka Organisasi Perangkat Daerah mengalami kenaikan 0,389. Koefisien pada variabel Akuntabilitas memiliki nilai positif yang memiliki arti apabila variabel Akuntabilitas mengalami kenaikan, maka variabel Organisasi Perangkat Daerah akan mengalami kenaikan.

3. Transparansi (X2)

Pada persamaan regresi linier berganda diketahui bahwa nilai koefisien transparansi sebesar 0,307 artinya jika variabel bebas lain nilainya konstan dan Transparansi mengalami kenaikan 1 satuan, maka Organisasi Perangkat Daerah mengalami kenaikan 0,307. Koefisien pada variabel Transparansi memiliki nilai positif yang memiliki arti apabila variabel Transparansi mengalami kenaikan, maka variabel Organisasi Perangkat Daerah akan mengalami kenaikan.

Tabel 4.13 Model Persamaan Regresi

Model 2

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.782	1.295		1.376	.173
	AKUNTABILITAS	.452	.102	.462	4.448	.000
	TRANSPARANSI	.087	.097	.090	.893	.375
	OPD	.378	.102	.347	3.696	.000

Sumber : Data Primer yang telah diolah, 2023

Dari table 4.13 hasil pengolahan data model regresi linear yang dihasilkan adalah :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 Z + \varepsilon$$

$$Y = 1.782 + 0,452X_1 + 0,087X_2 + 0,378Z + \varepsilon$$

Dari persamaan regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Nilai konstanta yang didapat dari persamaan regresi sebesar 1.782 dapat diartikan bahwa jika Akuntabilitas, Transparansi dan Organisasi Perangkat Daerah nilainya konstan atau tetap, maka nilai variabel Kualitas Laporan Keuangan sebesar 1.782.

2. Akuntabilitas (X1)

Pada persamaan regresi linier berganda diketahui bahwa nilai koefisien Akuntabilitas adalah 0,452 artinya jika variabel bebas lain nilainya konstan dan Akuntabilitas mengalami kenaikan nilai 1 satuan, maka Kualitas Laporan Keuangan mengalami kenaikan sebesar 0,452. Koefisien pada variabel Akuntabilitas memiliki nilai positif yang memiliki arti apabila variabel Akuntabilitas mengalami kenaikan, maka variabel Kualitas Laporan Keuangan akan mengalami kenaikan.

3. Transparansi (X2)

Pada persamaan regresi linier berganda diketahui bahwa nilai koefisien transparansi sebesar 0,087 artinya jika variabel bebas lain nilainya konstan dan Transparansi mengalami kenaikan nilai 1 satuan, maka Kualitas Laporan Keuangan mengalami kenaikan sebesar 0,087. Koefisien pada variabel Transparansi memiliki nilai positif yang memiliki arti apabila variabel Transparansi mengalami kenaikan, maka variabel Kualitas Laporan Keuangan akan mengalami kenaikan.

4. Organisasi Perangkat Daerah (Z)

Pada persamaan regresi linier berganda diketahui bahwa nilai koefisien kualitas laporan keuangan sebesar 0,378 artinya jika variabel bebas lain nilainya konstan dan Organisasi Perangkat Daerah mengalami kenaikan nilai 1 satuan, maka Kualitas Laporan Keuangan mengalami kenaikan sebesar 0,378. Koefisien pada variabel Organisasi Perangkat Daerah memiliki nilai positif yang memiliki arti apabila variabel Organisasi

Perangkat Daerah mengalami kenaikan, maka variabel Kualitas Laporan Keuangan akan mengalami kenaikan.

4.6 Uji Kebaikan Model

4.6.1 Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji statistik F digunakan untuk menunjukkan apakah seluruh variabel independen yang disajikan dalam model regresi mempunyai pengaruh yang sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Kriteria pengambilan keputusan dalam uji F adalah jika nilai Sig. < 0,05 maka terdapat pengaruh secara simultan, sedangkan jika nilai Sig. > 0,05 maka tidak ada pengaruh secara simultan. Hasil Uji F sebagai berikut :

Tabel 4.14

**Hasil Analisis Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)
Anatara Akuntabilitas, Transparansi, Kualitas Laporan Keuangan
dengan Organisasi Perangkat Daerah**

Model Regresi	P Value	Keterangan
1	0,000	Model Fit

Sumber : Data Primer yang telah diolah, 2023

Berdasarkan tabel diatas diketahui nilai probabilitasnya sebesar 0,000. Karena probabilitas 0,000 jauh lebih kecil dari 0,05, maka berdasarkan dasar pengambilan keputusan Uji statistik F, dapat disimpulkan bahwa secara simultan atau bersama-sama termasuk akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pelaporan keuangan mempengaruhi organisasi perangkat daerah.

4.6.2 Hasil Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R²)

Pengujian koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen (Ghozali, 2018). Nilai koefisien determinasi antara nol sampai 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$). Semakin tinggi koefisien determinasi (R^2) atau nilainya mendekati satu, maka hasil model regresi untuk menjelaskan variabel independen terhadap variabel dependen akan semakin kuat. Berdasarkan hasil pengolahan diperoleh hasil koefisien determinasi sebagai berikut :

Tabel 4.15
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)
Model 1

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.731 ^a	.534	.523	1.417

Sumber : Data Primer yang telah diolah, 2023

Pada table 4.15 menunjukkan model diatas terlihat bahwa nilai adjusted R – squared sebesar 0,523 atau 52,3%. Artinya variabel independen (Akuntabilitas dan Transparansi) dapat menjelaskan variabel dependen (Organisasi Perangkat Daerah) sebesar 52,3% sedangkan sisanya 47,7% dipengaruhi oleh variabel lain.

Tabel 4.16 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model 2

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.817 ^a	.668	.655	1.312

Sumber : Data Primer yang telah diolah, 2023

Pada table 4.16 menunjukkan bahwa model kedua diatas terlihat bahwa nilai adjusted R – squared sebesar 0,655 atau 65,5%. Artinya variabel independen (Akuntabilitas, Transparansi, dan Organisasi Perangkat Daerah) dapat menjelaskan variabel dependen (Kualitas Laporan Keuangan) sebesar 65,5% sedangkan sisanya 34,5% dipengaruhi oleh variabel lain.

4.6.3 Pengujian Hipotesis

Hasil Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji secara parsial pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan asumsi variabel lainnya adalah konstanta (Ghozali, 2018). Kriteria pengambilan keputusan adalah jika tingkat signifikansi < 0,05 maka terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen dan dependen. Apabila tingkat signifikan > maka tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen dan dependen. Hasil uji t sebagai berikut :

Tabel 4.17 Hasil Uji t

	Model	B	Sig.	Hasil	Keterangan
1	(Constant)	-1,275	0,362		
	Akuntabilitas terhadap OPD	0,389	0,000	Positif Signifikan	Hipotesis diterima
	Transparansi terhadap OPD	0,307	0,003	Positif signifikan	Hipotesis diterima
2	(Constant)	1,782	0,173		
	Akuntabilitas terhadap Kualitas Laporan Keuangan	0,452	0,000	Positif signifikan	Hipotesis diterima
	Transparansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan	0,087	0,375	Positif Tidak signifikan	Hipotesis ditolak
	OPD terhadap Kualitas Laporan Keuangan	0,378	0,000	Positif signifikan	Hipotesis diterima

Sumber : Data Primer yang telah diolah, 2023

Berdasarkan hasil data pada table diatas maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

1. Pengaruh Akuntabilitas terhadap Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan table 4.17 menunjukkan bahwa nilai koefisien variabel Akuntabilitas sebesar 0,389 dengan arah positif dan nilai signifikansi sebesar 0,000 dimana lebih kecil dari 0,05 yang berarti variabel Akuntabilitas memiliki pengaruh terhadap Organisasi Perangkat Daerah.

Dengan demikian dapat disimpulkan hipotesis pertama (H1) yang menyatakan bahwa Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap Organisasi Perangkat Daerah “Diterima”.

2. Pengaruh Transparansi terhadap Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan table 4.17 menunjukkan bahwa nilai koefisien variabel Transparansi sebesar 0,307 dengan arah positif dan nilai signifikansi sebesar 0,003 dimana lebih kecil dari 0,05 yang berarti variabel Transparansi memiliki pengaruh terhadap Organisasi Perangkat Daerah.

Dengan demikian dapat disimpulkan hipotesis pertama (H2) yang menyatakan bahwa Transparansi berpengaruh positif terhadap Organisasi Perangkat Daerah “Diterima”.

3. Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan table 4.17 menunjukkan bahwa nilai koefisien variabel Akuntabilitas sebesar 0,452 dengan arah positif dan nilai signifikansi sebesar 0,000 dimana lebih besar dari 0,05 yang berarti variabel Akuntabilitas memiliki pengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Dengan demikian dapat disimpulkan hipotesis pertama (H3) yang menyatakan bahwa Akuntabilitas berpengaruh negatif terhadap Kualitas Laporan Keuangan “Diterima”.

4. Pengaruh Transparansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan table 4.17 menunjukkan bahwa nilai koefisien variabel Transparansi sebesar 0,087 dengan arah positif dan nilai signifikansi sebesar 0,375 dimana lebih besar dari 0,05 yang berarti

variabel Transparansi memiliki pengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Dengan demikian dapat disimpulkan hipotesis pertama (H4) yang menyatakan bahwa Transparansi berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan “Ditolak”.

5. Pengaruh Organisasi Perangkat Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan

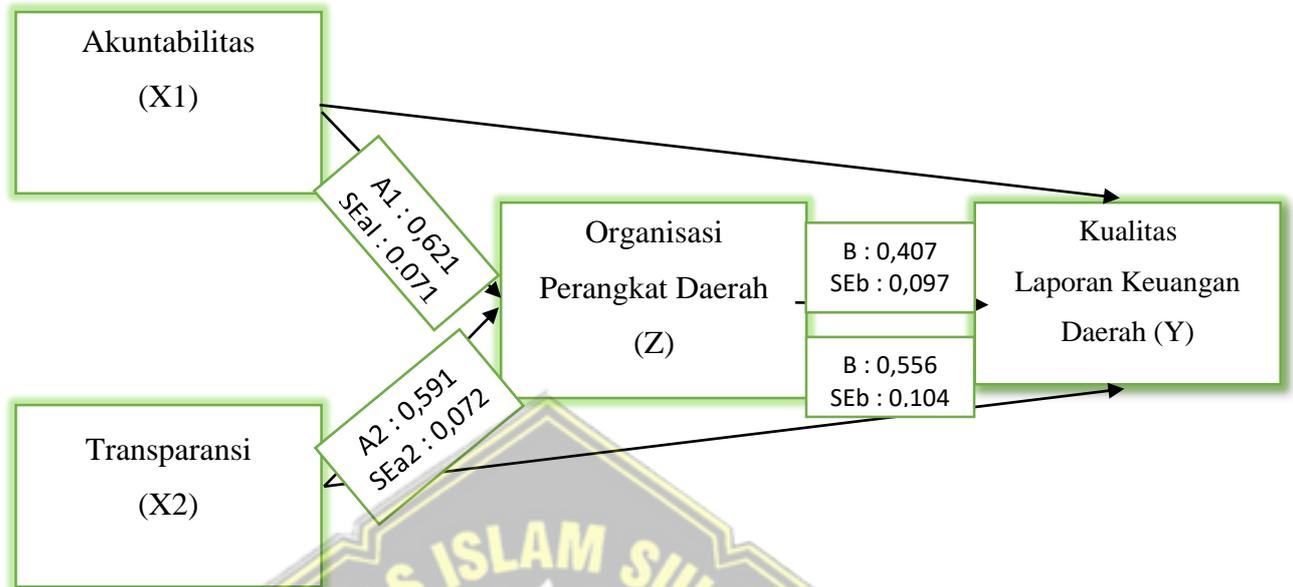
Berdasarkan table 4.17 menunjukkan bahwa nilai koefisien variabel Organisasi Perangkat Daerah sebesar 0,378 dengan arah positif dan nilai signifikansi sebesar 0,000 dimana lebih kecil dari 0,05 yang berarti variabel Organisasi Perangkat Daerah memiliki pengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Dengan demikian dapat disimpulkan hipotesis pertama (H5) yang menyatakan bahwa Organisasi Perangkat Daerah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan “Diterima”.

4.7 Pengujian Tidak Langsung

Pengujian tidak langsung dalam penelitian ini menggunakan uji sobel dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh variabel intervening yaitu organisasi perangkat daerah dalam memediasi variabel independen yaitu akuntabilitas dan transparansi terhadap variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan. Jika hasil uji sobel > critical ratio maka terdapat pengaruh mediasi

Gambar 4.1 Pengaruh langsung dan tidak langsung



Tabel 4.18 Hasil Uji Sobel Test

Model 1

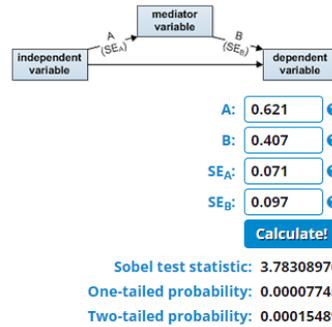
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.836	1.292		1.421	.159
	AKUNTABILITAS	.499	.087	.510	5.754	.000
	OPD	.407	.097	.374	4.216	.000

Sumber : Data Primer yang telah diolah, 2023

Dari table 4.18 diatas menunjukkan hasil dari perhitungan yang didapatkan dari pengaruh akuntabilitas yang di mediasi oleh organisasi perangkat daerah terhadap kualitas laporan keuangan, maka perhitungan untuk sobel test sebagai berikut.

Gambar 4.2

Hasil Uji Sobel



Sumber : Data Primer yang telah diolah, 2023

Persamaan uji sobel tersebut dapat dijelaskan bahwa hasil dari uji sobel yaitu sebesar 3,78 lebih besar 1,98 dari critical ratio. Maka dapat disimpulkan bahwa OPD memediasi hubungan Akuntabilitas terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Tabel 4.19

Hasil Uji Sobel Test

Model 2

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
		1	(Constant)	5.465		
	TRANSPARANSI	.311	.092	.323	3.379	.001
	OPD	.556	.104	.511	5.335	.000

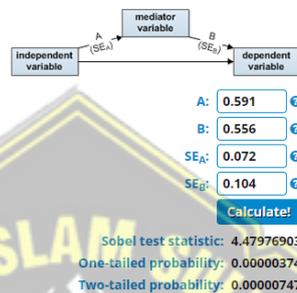
Sumber : Data Primer yang telah diolah, 2023

Dari table 4.19 diatas menunjukkan hasil dari perhitungan yang didapatkan dari pengaruh transparansi yang di mediasi oleh organisasi perangkat daerah

terhadap kualitas laporan keuangan, maka perhitungan untuk sobel test sebagai berikut.

Gambar 4.3

Hasil Uji Sobel



Sumber : Data Primer yang telah diolah, 2023

Persamaan uji sobel tersebut dapat dijelaskan bahwa hasil dari uji sobel yaitu sebesar 4,47 lebih besar 1,98 dari critical ratio. Maka dapat disimpulkan bahwa OPD memediasi hubungan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

4.8 Pembahasan Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis apakah ada hubungan antara variabel independen (X) yaitu akuntabilitas dan transparansi serta variabel perantara (Z) yaitu organisasi perangkat daerah dengan variabel dependen (Y) yaitu kualitas laporan keuangan. Berikut kesimpulan hasil uji hipotesis :

4.8.1 Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan. Artinya jika akuntabilitas bertambah atau berkurang maka juga mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Koefisien yang bertanda positif

menunjukkan bahwa semakin tinggi akuntabilitas responden maka semakin tinggi pula kualitas laporan keuangannya..

Akuntabilitas dapat dijadikan tolak ukur dalam penyajian kualitas laporan keuangan karena dengan adanya akuntabilitas responden dapat mengambil sebuah keputusan secara efektif dan efisien. Hasil penelitian ini mendukung teori agensi yang menjabarkan bahwa pemerintah atau pegawai instansi daerah memberikan pertanggungjawaban terhadap masyarakat melalui penyajian laporan keuangan yang baik sehingga akan meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Hasil analisis ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Akbar (2022), Tahir, Malia, dan Faisol (2021), Setyo (2020), dan Vidyasari (2021) yang menyimpulkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

4.8.2 Pengaruh Transparansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil analisis penelitian membuktikan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Artinya apabila transparansi mengalami peningkatan atau penurunan maka akan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Koefisien bertanda positif menunjukkan bahwa semakin tingginya transparansi dari responden, maka untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan juga akan semakin tinggi.

Transparansi menjadi tolak ukur untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan karena dengan adanya transparansi membuat responden efektif dan efisien dalam mengambil sebuah keputusan. Hal ini sesuai dengan teori legitimasi, dimana pemerintah daerah ingin menunjukkan kinerjanya yang telah dicapai kepada publik.

Penerapan transparansi yang dilakukan oleh pemerintah juga mewujudkan pemerintah daerah yang lebih transparan dalam menyajikan informasi keuangan kepada publik untuk memiliki keinginan melegitimasi kinerja dalam pengelolaan keuangan dengan laporan keuangan yang berkualitas tinggi.

Hasil analisis ini mendukung hasil analisis penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nasution (2019), Alfarizi dan Juniarti (2020), dan Firmansyah, Yuniar, dan Arfiansyah (2022), menjelaskan bahwa variabel Transparansi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap variabel kualitas laporan keuangan.

4.8.3 Pengaruh Organisasi Perangkat Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Organisasi Perangkat Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Artinya apabila organisasi perangkat daerah mengalami peningkatan atau penurunan dalam informasi keuangan maka hal tersebut juga berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Koefisien bertanda positif menunjukkan bahwa semakin tingginya akuntabilitas dari responden, maka untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan akan semakin tinggi pula.

Organisasi perangkat daerah menjadi tolak ukur untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan karena dengan adanya organisasi perangkat daerah yang tersistematis dan tersruktur membuat responden efektif dan efisien dalam mengambil sebuah keputusan. Hal ini sesuai dengan teori kegunaan – keputusan informasi yang dilakukan oleh pemerintah dengan membandingkan program atau kegiatan yang sedang/sudah berjalan dengan tahun sebelumnya, penaksiran

operasional keuangan dan kondisi keuangan serta penentuan kebijakan terlaksananya anggaran yang telah dibuat.

Hasil analisis ini mendukung hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Maulana (2021) menjelaskan bahwa Organisasi Perangkat Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

4.8.4 Pengaruh Akuntabilitas terhadap Organisasi Perangkat Daerah

Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap organisasi perangkat daerah. Artinya apabila akuntabilitas mengalami peningkatan atau penurunan maka hal tersebut tidak memiliki pengaruh terhadap organisasi perangkat daerah.

Akuntabilitas menjadi bagian dari bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh organisasi perangkat daerah. Hal ini mendukung dari teori agensi yang menyatakan bahwa akuntabilitas dipahami sebagai kewajiban pihak Organisasi Perangkat Daerah (*agent*) dalam memberikan pertanggungjawaban secara akurat dan inklusif terhadap masyarakat (*principal*) yang mempunyai hak dalam mengetahui pertanggungjawaban tersebut.

Hasil ini mendukung hasil analisis penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Putra 2018) menjelaskan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap organisasi perangkat daerah.

4.8.5 Pengaruh Transparansi terhadap Organisasi Perangkat Daerah

Hasil analisis penelitian membuktikan bahwa transparansi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap organisasi perangkat daerah. Artinya apabila transparansi mengalami peningkatan atau penurunan maka akan berpengaruh terhadap organisasi perangkat daerah. Koefisien bertanda positif menunjukkan

bahwa semakin tingginya transparansi dari responden, maka untuk meningkatkan organisasi perangkat daerah juga akan semakin tinggi.

Transparansi menjadi tolak ukur untuk meningkatkan organisasi perangkat daerah, karena dengan adanya transparansi membuat responden efektif dan efisien dalam mengambil sebuah keputusan. Hal ini mendukung teori pilihan publik dimana dalam teori ini menjelaskan bahwa masyarakat akan mempercayai instansi pemerintah yang mampu memenuhi harapan dan memberikan pelayanan terbaik sehingga menjadi pilihan masyarakat. Transparansi memberikan peningkatan kepercayaan publik terhadap organisasi perangkat daerah, sejalan dengan prinsip organisasi lewat keterbukaan informasi akan memberikan sebuah prioritas pilihan dalam pelayanan publik.

Hasil analisis ini tidak mendukung hasil analisis penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Firmansyah, Yuniar, dan Arfiansyah (2022). Sedangkan hasil penelitian ini mendukung hasil analisis penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ruhbaniah, Agusdin, dan Alamsyah (2017) menjelaskan bahwa transparansi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap variabel Organisasi Perangkat Daerah.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian yang telah dilakukan mengenai “Pengaruh Organisasi Perangkat Daerah dalam Memediasi antara Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan” maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Akuntabilitas terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi atau rendahnya akuntabilitas, maka memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan
2. Transparansi terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi atau rendahnya transparansi, maka memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan
3. Organisasi perangkat daerah terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi atau rendahnya akuntabilitas, maka memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan
4. Akuntabilitas terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap organisasi perangkat daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi atau rendahnya akuntabilitas, maka tidak memiliki pengaruh

terhadap organisasi perangkat daerah. Dalam hal tersebut organisasi perangkat daerah harus memberikan pertanggung jawaban yang sesuai dengan aturan dan kebijakan agar dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan yang baik.

5. Transparansi terbukti tidak berpengaruh positif signifikan terhadap organisasi perangkat daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi atau rendahnya transparansi, maka memiliki pengaruh terhadap organisasi perangkat daerah.

5.2 Implikasi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan implikasi praktis bagi organisasi perangkat daerah dalam unsur pertanggung jawaban dan keterbukaan informasi keuangan secara publik. Dalam meningkatkan unsur tersebut memberikan peluang lebih besar untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan terutama menjadikan instansi pemerintah sebagai ruang kepercayaan publik. Penelitian ini juga diharapkan memberikan informasi secara akurat pada organisasi perangkat daerah dalam mengetahui proses tanggung jawab dan keterbukaan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Peneliti hanya menggunakan sampel tidak lebih dari 20 organisasi perangkat daerah sehingga tidak dapat mengetahui secara keseluruhan responden dalam upaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi terhadap kualitas laporan keuangan pada organisasi perangkat daerah di Jawa Tengah

Peneliti hanya menggunakan kuesioner berupa hardfile dan google form tanpa menggunakan unsur pendukung lainnya seperti wawancara, sehingga peneliti tidak mengetahui secara penuh keseriusan responden dalam pengisian kuesioner penelitian.

5.4 Saran

1. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian factor – factor lain yang mempengaruhi peningkatan kualitas laporan keuangan seperti Sistem Informasi Akuntansi, dll.
2. Disarankan untuk melakukan penyebaran kuesioner dengan jangka waktu yang lebih lama karena untuk memilih mana yang terbaik untuk dipilih menjadi responden pada sampel penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiningih, Sri Wahyu, Sri Murni, and Gustita Arnawati Putri. 2017. "Audit Findings, Local Government Characteristics, and Local Government Financial Statement Disclosure." *Review of Integrative Business and Economics Research* 6(3): 179–87. <http://buscompress.com/journal-home.html>.
- Akuntansi, Program Studi, and Universitas Lambung Mangkurat. 2017. "Jurnal Akuntansi Dan Bisnis." 17(2): 100–109.
- Alfarizi, Salman, and Juniarti. 2020. "Pengaruh Akuntabilitas Keuangan, Transparansi, Pengawasan Dan Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Bekasi (Periode Tahun 2015-2018)." *Artikel Indonesia* (1): 1–24.
- Arfan, Muhammad, Darwanis Darwanis, and Johan Wahyudi. 2021. "Kualitas Pemeriksaan Auditor Internal Pemerintah: Studi Pada Inspektorat Kabupaten Dan Kota Di Aceh." *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi* 21(1): 17–34.
- Bagjana, Indra Firmansyah, and Andry Arifian Rachman. 2021. "Factors Affecting the Quality of SKPD Financial Reports in Cimahi City Local Government." *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)* 13(2): 300–313.
- Castillo, Laila Castro, and Arneil Garcia Gabriel. 2020. "Transparency and Accountability in the Philippine Local Government." *Global Encyclopedia of Publik Administration, Publik Policy, and Governance*: 1–9.
- Dutta, Nabamita, and Deepraj Mukherjee. 2018. "Can Financial Development Enhance Transparency?" *Economic Change and Restructuring* 51(4): 279–302.
- Ermawati, Nanik, and Nurul Rizka Arumsari. 2020. "Determinan Kinerja Manajerial Pada Organisasi Perangkat Daerah (Opd) Kabupaten Kudus." *Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen* 9(1): 63–84.
- Firmansyah, Amrie, Muhamad Rizal Yuniar, and Zef Arfiansyah. 2022. "Kualitas Laporan Keuangan Di Indonesia: Transparansi Informasi Keuangan Dan Karakteristik Pemerintah Daerah." *Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI)* 4(2): 181–97.
- Fs, SAINS. 2019. "Lembaga Penelitian Dan Penulisan Ilmiah Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan." *Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan* 2(3): 149–62.
- Herubawa, Dio Agung, and Syaiful Ali. 2019. "Evaluasi Peran Pemberian Konsultansi Inspektorat Daerah: Studi Kasus Pada Kabupaten Padang Lawas Utara." *Jurnal Akuntansi dan Bisnis* 19(1): 13.

- Jatmiko, Bambang. 2020. "Pengaruh Pengawasan Internal, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman (Survei Pada Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sleman)." *Jurnal Akuntansi Trisakti* 7(2): 231–46.
- Kasus, Studi, Inspektorat Kabupaten, and Bengkulu Tengah. 2019. "Jurnal Akuntansi Unihaz-JAZ Desember Jurnal Akuntansi Unihaz-JAZ Desember." *Akuntansi Unihaz-JAZ* 1(17): 19–35.
- Kholmi, Masiyah. 2022. "APAKAH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENTING DALAM PELAPORAN KEUANGAN MASJID? Machine Translated by Google." 13(2): 309–25.
- Masyarakat, Partisipasi, and D A N Pengawasan. 2017. "NGAWI (Studi Kasus Kantor Desa Di Kecamatan Ngawi , Kabupaten Ngawi) Disusun Oleh :"
- Maulana, Eka. 2021. "Peran Inspektorat Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 2(2): 276–80.
- Muhasaba, E L, and Jurnal Akuntansi. 2021. "1 , 2 1, 2." 12(2): 157–71.
- Muhtar, Muhtar, Deni Ariyanto Putro, and Sutaryo Sutaryo. 2017. "Determinants of Local Government Transparency: A Study on Local Government in Indonesia." *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia* 12(2): 141–56.
- Nimas Ayu Pulpi. 2014. "Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Akuntabilitas Dan Partisipasi Masyarakat Sebagai Moderasi." *Accounting Analysis Journal* 3(4): 457–65.
- Panjaitan, Roymon, and Echan Adam. 2022. "AKRUAL: Jurnal Akuntansi." 14(1): 47–62.
- Purba, Sahala, and Rasdianta Purba. 2023. "Determinasi Dalam Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah." *Jurnal Akuntansi Trisakti* 10(1): 137–52.
- Putra, Dimas Pratama. 2018. "Pengaruh Kemampuan Aparatur, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, Dan Peran Pengawas Internal Terhadap Akuntabilitas Keuangan Dengan Kualitas Laporan Keuangan Sebagai Variabel Intervening." *Ilmiah STIE MDP* 7(2): 82–196.
- Putri, Andita Cahyasari Pradana, and Fajar Syaiful Akbar. 2022. "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Opd Kota Surabaya." *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)* 6(2): 14–25.
- Putri, Putu Prema Sulistyning, Rhosalina Damayanti, and Aprina Nugrahesthy Sulistya Hapsari. 2022. "Village Fund Allocation Practice: The Investigation

- of Accountability and Transparency.” *Jurnal Ilmiah Akuntansi* 6(2): 455.
- Rahayu, Komang Novita Sri, and Luh Gede Kusuma Dewi. 2022. “Pengaruh Transparansi Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Buleleng.” *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)* 13(2): 464–71.
- Ruhbaniah, Aluh, Agusdin Agusdin, and Alamsyah Alamsyah. 2017. “Determinan Kinerja Auditor Internal Pada Inspektorat Se-Pulau Lombok.” *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)* 1(1): 66.
- S, Yohanes P Bondan, and Ali Djamhuri. 2017. “Kapabilitas Dinamis , Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintahan Dan Kualitas Laporan Keuangan SKPD (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Kediri).” 19(2): 82–101.
- Setyawan, Hendry, and Vinda Erryana. 2016. “Determinan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.” *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 5(1): 1–14.
- Setyo, Dekeng. 2020. “Devi Paper Jab.”
- Sihite, Renny Novsellia, and Holiawati. 2017. “Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah, SPI Dan Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.” *Jurnal Akuntansi & Investasi Aset (Akuntansi Riset)* 9(2): 81–92.
- Skedsmo, Guri, and Stephan Gerhard Huber. 2019. “Forms and Practices of Accountability in Education.” *Educational Assessment, Evaluation and Accountability* 31(3): 251–55.
- Sutaryo. 2018. “Determinan Efektivitas Audit Internal Di Inspektorat Provinsi Jawa Timur.” *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis* 13(1): 1–10.
- Sutaryo, Sutaryo, and Kurniasari Tri Amanu. 2020. “Transparansi Informasi Pemerintah Daerah Melalui Website: Faktor Politik Atau Keuangan?” *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi* 20(1): 43–60.
- Sutopo, Bambang, Trisninik Ratih Wulandari, Arum Kusumaningdyah Adiaty, and Dany Adi Saputra. 2017. “E-Government, Audit Opinion, and Performance of Local Government Administration in Indonesia.” *Australasian Accounting, Business and Finance Journal* 11(4): 6–22.
- Tahir, Sofiyah Yatimah, Evi Malia, and Imam Agus Faisol. 2021. “Pengaruh Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Pengetahuan Kepala Desa, Dan Transparansi Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Desa Di Kabupaten Pamekasan.” *Journal of Accounting and Financial Issue (JAFIS)* 1: 20–29.
- Vidyasari, Febriana Nafi’ah. 2021. “Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.” *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 10(4): 1–24.

Yanti, Harti Budi. 2021. “Kualitas Laporan Keuangan Instansi Pemerintah.” 21(2): 227–44.

Yusri, Adrianto. 2022. “Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Berbasis AkruaI Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.” *Sistem Informasi Akuntansi* (3).

Zeyn, Elvira. 2018. “The Effect of Internal Audit Quality on Financial Accountability Quality at Local Government.” 9(1): 34–43.

(Bimtek Peran Inspektorat Daerah sebagai APIP, 2022)

